



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan**

Tahun 2017

KATA PENGANTAR



Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasara/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini sesuai dengan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan selaku salah satu entitas Akuntabilitas Kinerja mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi.

Penyusunan laporan ini digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil dan capaian kegiatan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan selama tahun 2017.

Laporan kinerja ini juga harus menjadi salah satu cara evaluasi yang obyektif, efisien dan efektif terhadap Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perwujudan penyelenggaraan negara khususnya di Kementerian Kesehatan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga Laporan Kinerja (LKj) dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini.

Jakarta, 30 Januari 2018
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr.dr Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, M.HKes
NIP 196008121988121001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan beserta seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif sebanyak 75%, dan indikator Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas sebanyak 100%.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target kedua indikator di atas adalah sosialisasi, advokasi, pengalokasian anggaran sesuai kewenangan, pembentukan jejaring monev dan perencanaan antara pusat dan daerah.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah beberapa pelaksanaan kegiatan terhambat karena adanya keterlambatan pencairan anggaran, masih kurangnya SDM yang kompeten, masih rendahnya komitmen daerah.

Upaya pemecahan masalah yang diusulkan adalah sosialisasi, advokasi lintas program dan lintas sektor, serta pengalokasian dana sesuai dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut.

Realisasi anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar 75,43% dari dana yang digunakan sebesar Rp. 187.010.978.000,-. Dana ini dialokasikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dibagi menjadi 4 bagian.

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja program sebesar 4,77% (Rp. 8.923.645.000,-) dari total alokasi anggaran yang dapat digunakan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2017. Alokasi anggaran lainnya dipergunakan Ditjen Pelayanan Kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
<i>Executive Summary</i>	iii	
Daftar Isi	iv	
Daftar Tabel	v	
Daftar Gambar	vi	
Daftar Lampiran	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Penjelasan Umum Organisasi	1
	B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang dihadapi Organisasi	2
	C. Sistematika	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	6
	A. Perencanaan Kinerja	6
	B. Perjanjian Kinerja	8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	9
	A. Capaian Kinerja Organisasi	9
	1. Pencapaian Indikator Sasaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	10
	2. Prestasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	19
	B. Realisasi Anggaran	65
	C. Sumber Daya Lainnya	68
BAB IV	PENUTUP	70
	Lampiran	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Matrik Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2015-2019	7
Tabel 2	: Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2017	8
Tabel 3	: Pencapaian Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif	12
Tabel 4	: Pencapaian Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas	16
Tabel 5	: Pencapaian Bagian Program dan Informasi Tahun 2017	22
Tabel 6	: Pencapaian Bagian Hukormas Tahun 2017	39
Tabel 7	: Pencapaian Bagian Keuangan dan BMN Tahun 2017	41
Tabel 8	: Pencapaian Bagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2017	53
Tabel 9	: Jumlah Proses Kenaikan Pangkat Tahun 2017	56
Tabel 10	: Tabel pelaksanaan pemeliharaan sarana/prasarana perkantoran.	64
Tabel 11	: Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan perbagian	65
Tabel 12	: Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Jenis Belanja	66
Tabel 13	: Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Yang Mendukung Langsung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2017	66
Tabel 15	: Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan berdasarkan golongannya	68
Tabel 16	: Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan berdasarkan tingkat pendidikannya	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2017	2
Gambar 2	:	Peta Strategis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019	4
Gambar 3	:	Tampilan Aplikasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Terintegrasi (SISRUTE)	20
Gambar 4	:	Tampilan Aplikasi pendaftaran pasien melalui SMS Gateway	21
Gambar 5	:	Tampilan Aplikasi Warta dan Berita Yankes	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2016

72

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan
5. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri atas :

1. Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat.
3. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

4. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen Pelayanan Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2017



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Untuk itu semua permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah permasalahan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan juga.

Program pembinaan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan primer
2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi
3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional
4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan
5. Kapasitas manajemen puskesmas dan RS yang tidak merata, dan belum berbasis sistem manajemen kinerja
6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada PPK I yang sesuai standar secara merata di seluruh Indonesia
7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah, rumah sakit dan puskesmas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan visi :

AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menjalankan misi sebagai berikut :

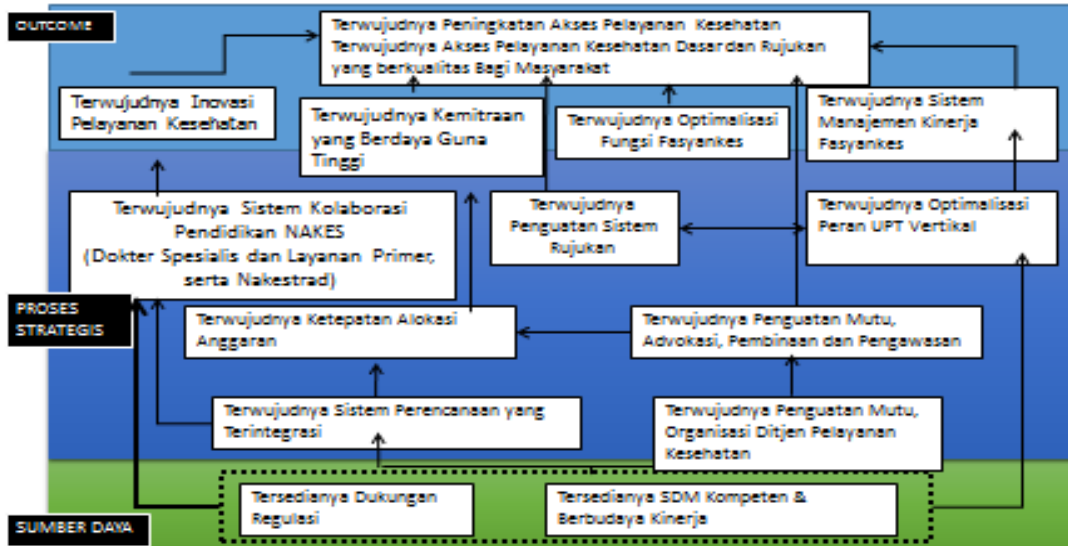
1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Selain itu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan juga telah menetapkan peta strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab akibat dari 15 sasaran strategis (yang menggambarkan arah dan prioritas strategis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang diperlukan guna memampukan dalam mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang). Peta strategi pencapaian visi tersebut disusun berbasis pendekatan *the balance-score card* dengan memperhatikan peta strategi pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019.

Gambar 2 Peta Strategis Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019

PETA STRATEGI DITJEN YANKES 2015-2018

VISI : MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN



Peta Strategis disusun untuk mencapai visi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2019 menciptakan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 2 (dua) tujuan strategis yaitu: terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (akreditasi fasyankes).

Guna mewujudkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan maka diperlukan pelaksanaan proses-proses strategis untuk mewujudkan inovasi pelayanan kesehatan, mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan (Dokter Spesialis dan Dokter pada layanan primer), mewujudkan kemitraan berdaya guna tinggi, mewujudkan penguatan sistem rujukan dan mewujudkan optimalisasi fungsi dari fasyankes. Selain itu proses-proses strategis lainnya yang perlu dilaksanakan secara ekselen adalah mewujudkan sistem manajemen kinerja fasyankes dan mewujudkan optimalisasi peran UPT Vertikal. Sasaran-sasaran strategis dalam meningkatkan mutu kelembagaan dari Ditjen Pelayanan Kesehatan adalah : 1) terwujudnya ketepatan alokasi anggaran sesuai dengan kegiatan prioritas, 2) terwujudnya penguatan mutu, advokasi, pembinaan dan

mutu pengawasan, 3) terwujudnya sistem perencanaan yang terintegrasi, 4) terwujudnya penguatan mutu organisasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai secara berkelanjutan, maka 2 sasaran strategis terkait perspektif sumber daya harus diwujudkan : 1) tersedianya dukungan regulasi, 2) tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berbasis kinerja. Dua sasaran strategis ini merupakan pondasi utama yang sangat menentukan dalam pencapaian visi dan tujuan Kemenkes.

C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

 A. Penjelasan Umum Organisasi

 B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi

 C. Sistematika

Bab II Perencanaan Kinerja

 A. Perencanaan Kinerja

 B. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

 A. Capaian Kinerja Organisasi

 B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan Kinerja juga merupakan dasar yang menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Dalam rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2017, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya pada program pembinaan upaya kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka pada tahun 2016 Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan berubah menjadi Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Matrik Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	IKK	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes	Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen kinerja berbasis Renstra	30%	40%	50%	60%	70%
		Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja	60%	70%	80%	90%	100%
2	Terwujudnya Ketepatan Alokasi Anggaran	Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya Sistem Perencanaan yang terintegrasi	Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif	30%	40%	60%	80%	100%
4	Terwujudnya Penguatan Mutu, Organisasi Ditjen Pelayanan Kesehatan	Jumlah SOP lintas Direktorat yang dihasilkan	10	10	10	10	10
5	Tersedianya Dukungan Regulasi	Jumlah Regulasi baru/revisi yang dihasilkan	40	40	40	40	40
6	Tersedianya SDM Kompeten & Berbudaya Kinerja	Persentase Karyawan Ditjen Yankes yang memiliki kompetensi yang sesuai	70%	75%	80%	85%	90%
		Persentase Karyawan Ditjen Yankes yang memiliki kinerja baik	65%	70%	75%	80%	85%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja dapat terwujud komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2017, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian kesehatan tahun 2015-2019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk mencapai target tersebut pada tahun 2017.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2017

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2017
1	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	1	Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif	60%
		2	Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas	100%

Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 216.656.596.000,- untuk kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja yang dicapai menggunakan standar, rencana, atau target serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2017, selain itu pengukuran kinerja dapat menjadi evaluasi untuk perencanaan dan kebijakan dimasa mendatang.

Tahun 2017 adalah tahun kedua Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melaksanakan tugas dan fungsinya setelah mengalami perubahan dalam struktur organisasi (SOTK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator, Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi pencapaian indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang, agar setiap program/kegiatan yang direncanakan ke depan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

**MENINGKATKAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM
PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN**

Indikator pencapaian sasaran tahun 2017 dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
3. Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen kinerja berbasis Rencana Strategis
4. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja
5. Jumlah SOP lintas Direktorat yang dihasilkan
6. Jumlah Regulasi baru/revisi yang dihasilkan
7. Persentase Karyawan Ditjen Yankes yang memiliki kompetensi yang sesuai
8. Persentase Karyawan Ditjen Yankes yang memiliki kinerja baik

Namun dari 8 indikator tersebut hanya 2 indikator yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 yaitu :

1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

Pencapaian kegiatan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Setditjen Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja kegiatan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan merupakan indikator output strategis untuk mencapai indikator outcome di tingkat eselon I (Ditjen Pelayanan Kesehatan).

Sekretariat Jenderal Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif

1) Sasaran indikator/kegiatan

Terwujudnya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

2) Definisi operasional

Monitoring dan evaluasi terintegrasi adalah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan instrumen terintegrasi (gabungan seluruh instrumen dari unit eselon II di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan) secara efektif (tujuan tercapai, tepat sasaran, dan tepat waktu)

3) Cara perhitungan

Jumlah pelaksanaan monev terintegrasi yang berjalan efektif dibagi jumlah seluruh pelaksanaan monev terintegrasi dikali 100 persen.

4) Rencana aksi untuk mencapai target

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut telah dibuat adalah berikut :

- a) Pembuatan instrumen monev terintegrasi
- b) Pengembangan dashboard
- c) Pelaksanaan evaluasi terintegrasi

5) Upaya yang dilakukan untuk mencapai target

- a) Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan monev terintegrasi tahun 2017 sebesar Rp. 2.057.914.000,-
- b) Pembuatan instrumen monev terintegrasi dengan mengakomodasi kebutuhan data dari direktorat teknis di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan
- c) Menyusun rencana pelaksanaan monev terintegrasi dalam dokumen perencanaan monev tahun 2017
- d) Melaksanakan monev terintegrasi
- e) Menyusun laporan hasil monev terintegrasi tahun 2017.

6) Pencapaian

Tabel 3. Pencapaian Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif.

INDIKATOR	TAHUN							
	2015		2016		2017		2018	2019
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif	30	33,3	40	50	60	75	80	100

Mengacu pada dokumen perencanaan monev tahun 2017, maka pada tahun 2017 dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yaitu Pencapaian Indikator Kinerja baik Kantor Pusat maupun Kantor Daerah, Realisasi anggaran pada program pembinaan pelayanan kesehatan, Pelaksanaan PHLN di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus di Daerah.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut melibatkan seluruh unit utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan khususnya dalam penyusunan instrumen. Integrasi yang dilakukan pada tahun ini adalah mengintegrasikan kebutuhan data dari masing-masing Direktorat Teknis dalam setiap instrumen evaluasi tersebut.

Pencapaian indikator kinerja persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif tahun 2017 sebesar 75%, adapun analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2017 adalah sebesar 60% dengan realisasi sebesar 75% atau pencapaian sebesar 125% dari target
- Realisasi tahun 2016 sebesar 50% dan realisasi tahun 2017 sebesar 75%, dapat dikatakan meningkat sebesar 25%.
- Jika dibandingkan dengan target akhir pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2019 (100%) maka realisasi tahun 2016 adalah sebesar 75%, diperlukan upaya yang lebih keras dan inovatif untuk mencapai target tersebut.

Adapun analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja dari indikator tersebut adalah :

- Membuat dokumen perencanaan monev dengan menentukan kegiatan prioritas
- Koordinasi yang rutin dilakukan dengan direktorat-direktorat teknis pelaksana kegiatan.
- Pemberian *feed back* ke pada satker pelaksana kegiatan setelah dilakukannya monev

7) Permasalahan:

a) Dana:

- Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan monev terintegrasi tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

b) Waktu:

- Pengambil data (surveior) yang berasal dari direktorat teknis mempunyai kewajiban tugas utama di direktoratnya sehingga waktu pengambilan data bersamaan dengan penyelesaian tugas masing-masing (jadwal yang bentrok).
- Adanya revisi anggaran yang berulang-ulang menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terbatas.

c) SDM:

- Jumlah pengambil data (surveior) terbatas
- Kemampuan surveior dalam mengambil dan menganalisa data belum merata

d) Sarana:

Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monev.

8) Usulan Pemecahan Masalah:

a) Dana:

- Melakukan optimalisasi sisa dana kegiatan menjadi sebuah kegiatan baru pada tahun 2017
- Mengalokasi anggaran untuk pelaksanaan monev terintegrasi tahun 2018 sebesar Rp 1.575.077.000,-

b) Waktu:

Pembuatan jadwal dan rencana kerja monev pada awal tahun anggaran, sehingga rencana kerja yang sudah disepakati dapat berjalan baik sesuai jadwal.

c) SDM

- Bersurat kepada direktorat teknis untuk dapat menentukan anggota tim pengambil data monev dan berkomitmen untuk dapat melaksanakan rencana kerja monev sesuai dengan kesepakatan.
- Melaksanakan pembekalan kepada surveior supaya terdapat persamaan persepsi dalam pengambilan dan analisis data.

d) Sarana

- Menggunakan *tools* aplikasi/system informasi dalam mengolah dan menyajikan data hasil monev.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun jejaring monev dengan satker daerah.

9) Efisiensi Sumber Daya:

- Melakukan kegiatan pengumpulan data capaian kegiatan secara elektronik, baik melalui email maupun aplikasi.
- Menggabungkan kegiatan bimtek dengan monev jika dilaksanakan di wilayah/daerah yang sama. Contoh: pengumpulan data e-renstra, bimtek SIMRS dan Monev DAK di rumah sakit rujukan provinsi dan regional

10) Realisasi Anggaran:

Tahun 2017, anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 2.057.914.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.058.318.578,- (99%)

b. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

1) Sasaran indikator/kegiatan

Terwujudnya ketepatan alokasi anggaran

2) Definisi Operasional

Sesuai dengan rencana aksi kegiatan Setditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2015-2019 tercantum bahwa alokasi anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang bersumber dari dana tugas pembantuan. Tetapi pada tahun 2016 dana tugas pembantuan tidak diadakan lagi. Sehingga untuk tahun 2016 yang dimaksud dengan “alokasi anggaran” adalah anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Satker yang dimaksud adalah RS Prov/Kab/Kota dan Dinkes Kab/Kota dengan kriteria yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Kab/kota yang menjadi target MDG's
2. Kab/Kota yang termasuk daerah DTPK
3. Kab/Kota yang memiliki RS Rujukan
4. Kriteria lain yang ditetapkan minimal dengan SK Menkes/Dirjen
5. Satker yang mengajukan usulan.

3) Cara Perhitungan

Jumlah satker yang mendapatkan anggaran dengan kriteria prioritas dibagi dengan jumlah satker yang mendapatkan alokasi anggaran pada tahun tersebut dikali 100%

4) Rencana Aksi Untuk Mencapai Target

1. Penguatan perencanaan berjenjang melalui Dinkes Propinsi menggunakan e-planning Ditjen Yankes
2. Pendampingan proses perencanaan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
3. Monev Terpadu Ditjen Pelayanan Kesehatan

5) Upaya yang dilakukan untuk mencapai target

1. Pengembangan aplikasi perencanaan e-planning Ditjen Yankes untuk menampung usulan dana alokasi khusus dari satker
2. Memberikan otoritas kepada Dinkes Propinsi untuk memberikan validasi/rekomendasi dari usulan satker di wilayah binaannya.
3. Melakukan monev dan pendampingan perencanaan agar satker dapat merencanakan sesuai dengan kegiatan prioritas.

6) Pencapaian

Tabel 4. Pencapaian Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

INDIKATOR	TAHUN							
	2015		2016		2017		2018	2019
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada tahun 2017, Setditjen Pelayanan Kesehatan melakukan kegiatan penguatan perencanaan berjenjang dan pendampingan proses perencanaan satker yang mengusulkan anggaran dana alokasi khusus tahun 2017. Kegiatan tersebut dibagi dalam 4 regional yang dilaksanakan pada awal tahun. Ouput dari kegiatan adalah tersedianya usulan dana alokasi khusus tahun 2017 dari satker dengan kriteria prioritas. Dari hasil pencapaian tersebut dapat dianalisa dengan hasil sebagai berikut :

- Jika dibandingkan dengan target indikator tahun 2016 (100%), maka capaian tahun 2017 adalah sebesar 100 %

- Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (100%), maka capaian 2016 sama dengan tahun 2017
- Jika dibandingkan dengan target capaian akhir periode rencana strategis (2019), maka capaiannya sama dengan target akhir periode.

Adapun analisa keberhasilan pencapaian indikator tersebut adalah :

- Adanya komitmen yang kuat antara pusat dan daerah dalam menentukan kriteria prioritas

7) Permasalahan

Dana :

- Terjadi kesalahan akun dalam pengalokasian dana untuk kegiatan perencanaan di Dinkes Propinsi
- Terjadi kelambatan dalam penunjukan PPK di daerah yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Waktu:

- Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal (*timeline*) yang telah ditentukan
- Waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan perencanaan tidak mencukupi karena jumlah satker yang mengajukan usulan cukup banyak.

SDM:

- Tenaga pendamping perencanaan dari pusat kurang mencukupi
- Tenaga operator aplikasi dari satker daerah sering berganti personil, yang menyebabkan harus belajar lagi dari awal.

Sarana dan Prasarana

- Akses internet yang kurang memadai

8) Usulan Pemecahan Masalah

Dana:

- Advokasi dan pendampingan ke dinkes propinsi dalam perencanaan kegiatan

Waktu:

- Pelaksanaan kegiatan perencanaan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disepakati bersama.

SDM:

- Mendorong Dinkes Propinsi untuk menetapkan tim perencana dan operator aplikasi dan tidak merubah tim tersebut minimal sampai dengan proses perencanaan selesai

Sarana dan Prasarana

- Mengatur jadwal pengisian usulan DAK kedalam aplikasi perencanaan (e-planning) sesuai dengan kapasitas internet yang tersedia

9) Efisiensi Sumber Daya :

- Memberikan pendampingan perencanaan satker dan dibagi dalam 4 regional, sehingga lebih efisien waktu dan tenaga jika dibandingkan dengan memberikan pendampingan perencanaan kepada satker per propinsi.

10) Realisasi Anggaran:

Tahun 2017, anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 6.865.731.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.256.397.695,- (76.56%)

Capaian indikator sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang tidak termasuk dalam perjanjian kinerja sebagaimana terlampir :

No	Indikator	Target				Capaian	
		RPJMN	Renstra	RKP	Renja KL	TW IV	%
Dukungan Managemen & Pelaksanaan Tugas Lainnya							
1	Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen kinerja berbasis Renstra		50			100	200,0%
2	Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja		80			95,9	119,9%
3	Jumlah SOP lintas Direktorat yang dihasilkan					10	100,0%
4	Jumlah Regulasi baru/revisi yang dihasilkan					40	100,0%
5	Persentase Karyawan Ditjen Yankes yang memiliki kompetensi yang sesuai					67	83,5%
6	Persentase Karyawan yang memiliki kinerja baik					100	133,2%

2. Prestasi dan Inovasi Setdijten Pelayanan Kesehatan

a. Perluasan cakupan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)

Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan menunjuk beberapa rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional yang bertujuan untuk memperkuat sistem rujukan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi berbagai permasalahan, seperti lambatnya penanganan pasien di IGD, fasyankes perujuk kesulitan mencari rumah sakit penerima rujukan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, dan kesulitan mendapatkan informasi tentang ketersediaan tempat tidur.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan membuat inovasi Sistem Rujukan Terintegrasi atau disingkat Sisrute. Sisrute adalah media komunikasi dan informasi yang selalu *update* antara fasyankes perujuk dengan fasyankes penerima rujukan untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan agar penanganan pasien lebih cepat, efektif dan efisien. Sisrute bertujuan untuk mengintegrasikan sistem informasi rujukan pasien pada seluruh rumah sakit dan mewujudkan percepatan pelayanan rujukan di rumah sakit.

Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh RS Wahidin Sudiro Husodo Makassar dengan cakupan layanan hanya di Propinsi Sulawesi Selatan, saat ini Kementerian Kesehatan sedang memperluas cakupan layanan melalui sisrute ke seluruh Indonesia.

Pada tahun 2017, cakupan sistem rujukan terintegrasi di perluas, saat ini semua RS UPT Vertikal sudah harus melakukan implementasi aplikasi sistrute ini, data sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar 1195 Faskes yang terhubung dengan sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE).

Aplikasi sistrute ini juga mendapat penghargaan dari Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI).

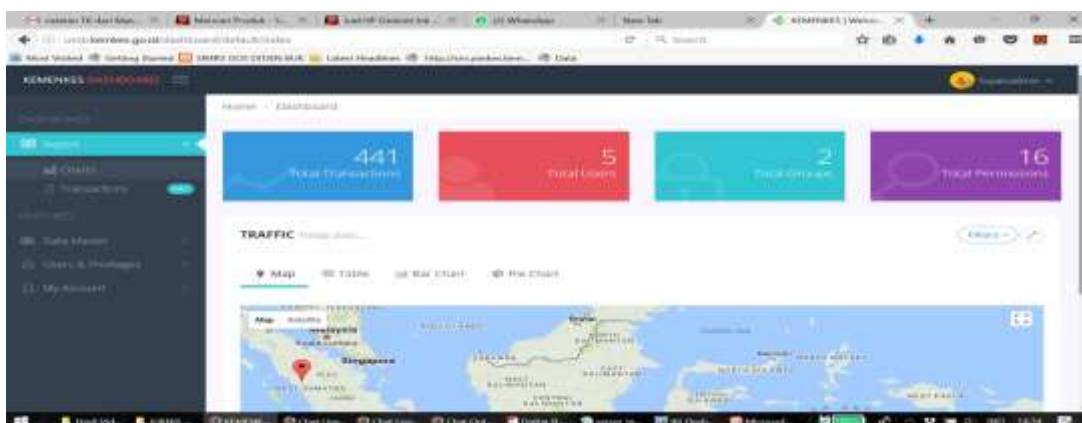
Gambar 3. Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Rumah Sakit Terintegrasi (SISRUTE)



b. Pendaftaran Pasien melalui SMS Gateway

Ditjen Pelayanan Kesehatan terus melakukan inovasi dalam menyelesaikan masalah antrian pasien di rumah sakit, selain menyediakan pendaftaran pasien melalui website dan versi android, Ditjen Pelayanan Kesehatan juga mengembangkan sistem pendaftaran pasien melalui sms gateway. Hal ini dikembangkan mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum menggunakan *smartphone* dan jaringan internet yang belum merata di seluruh daerah di Indonesia. SMS Gateway dikembangkan dengan metode UMB (*USSD Menu Browser*) agar mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran di rumah sakit. Pendaftaran Pasien melalui SMS Gateway juga merupakan salah satu indikator yang harus dicapai oleh RS UPT Vertikal.

Gambar 4. Tampilan Aplikasi pendaftaran pasien melalui SMS Gateway

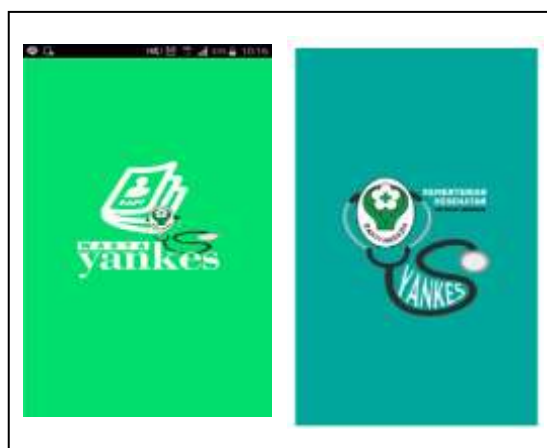


c. Pengembangan aplikasi berita dan warta yankes berbasis IOS

Pada saat ini kebutuhan informasi tentang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan sangatlah penting, terlebih di era teknologi dan informasi yang berkembang pesat. Informasi tersebut bukan hanya dimanfaatkan oleh kalangan internal Ditjen Pelayanan Kesehatan saja, dapat juga diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Untuk menjawab kebutuhan informasi tersebut, maka Ditjen Pelayanan Kesehatan mengembangkan aplikasi berita dan warta yankes berbasis IOS.

Aplikasi berita Yankes IOS berisikan informasi, berita dan foto-foto pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan. Dimana kontributor berita yankes bukan hanya dari kantor pusat Ditjen Yankes melainkan juga seluruh humas UPT Vertikal dan Fasyankes lainnya. Untuk aplikasi warta yankes adalah sebuah aplikasi dimana pengguna dapat membaca setiap edisi warta yankes secara *online* dan *offline*, warta yankes merupakan pembahasan lebih dalam (*in depth*) terkait isu strategis ataupun kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan. Kontributor warta yankes dari internal Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Gambar 5. Tampilan Aplikasi Warta dan Berita Yankes



3. Tupoksi Sekretariat

a. Bagian Program dan Informasi

1) Sasaran Indikator/Kegiatan

Terlaksananya penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Program dan Informasi dibagi menjadi 3 subbagian yaitu :

- Subbagian Program
- Subbagian Anggaran
- Subbagian Informasi dan Evaluasi

2) Pencapaian

Tabel 5. Pencapaian Bagian Program dan Informasi Tahun 2017

No	Komponen	Keluaran			Alokasi	Realisasi	
		Target	Capaian	%		Rp	%
1	Penyusunan Rencana Program	1	1	100	6.865.731.000	5.256.397.695	76,56
2	Penyusunan Rencana Anggaran	1	1	100	6.716.593.000	3.727.657.688	55,50
3	Pengelolaan Informasi dan Evaluasi	1	1	100	7.520.692.000	4.315.476.069	57,38

tahun 2017 Bagian Program dan Informasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- (1) **Penyusunan Juknis Perencanaan Program Pelayanan Kesehatan.**

Kegiatan Penyusunan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan program Pelayanan Kesehatan adalah menyusun rambu-rambu kegiatan yang meliputi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan serta pelaporan sebagai dasar penyusunan anggaran untuk Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

(2) **Harmonisasi RPJMN, Renstra, Renaksi dan RKP di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan benang merah Indikator dalam RPJMN, Renstra, Renaksi dan RKP di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dengan demikian target yang dicantumkan dalam RPJMN dapat diterjemahkan dalam Renstra, Renaksi dan RKP Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

(3) **Penyusunan Renja-KL Program Ditjen Pelayanan Kesehatan**

Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari penjabaran Dokumen RKP yang mana Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan merumuskan prioritas pembangunan nasional kesehatan melalui program-program an kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya beserta alokasi anggarannya berdasarkan pagu indikatif dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

(4) **Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) TA 2017**

Kegiatan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) ini disusun dalam rangka menyempurnakan Arsitektur RKA-KL (Struktur Informasi Kinerja) yang sesuai dengan pendekatan fungsi mengacu pada fungsi pemerintahan yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Disamping itu dipergunakan untuk memperkuat dan mempertajam informasi kinerja. Substansi pendekatan berdasarkan

fungsi adalah sesuai kerangka logika berfikir pada setiap level organisasi dengan memperhatikan indikator dan targetnya.

(5) Advokasi dan Sosialisasi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan Program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang sudah ditetapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi meliputi pemberian penjelasan tentang arah kebijakan Program yang meliputi tujuan, sasaran beserta indikator pencapaian baik kegiatan pokok, kegiatan indikatif dan operasional Program Pelayanan Kesehatan serta program terkait lainnya sebagai acuan dalam menyusun rencana program dan anggaran tahunan dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan secara lebih terarah, komprehensif, terintegrasi dan sinergis dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

(6) Pertemuan Reviu Perencanaan Kegiatan Th 2017 oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

kegiatan dilakukan dalam rangka menyusun semua kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang sudah tersusun dalam Rencana Kerja masing-masing Direktorat sehingga semua kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri dan semua dapat diukur sesuai dengan output yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dapat dicapai.

(7) Pertemuan Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Bagian Program dan informasi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan budaya kinerja pegawai agar karyawan khususnya bagian Program ada peningkatan kinerja, menambah wawasan dan ada penyegaran sehingga karyawan mempunyai dedikasi .

(8) Penyusunan Perencanaan Program Pelayanan Kesehatan melalui Aplikasi Elektronik.

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pelayanan Kesehatan melalui Aplikasi Elektronik dilakukan setiap tahun anggaran dengan metode menerima usulan dari seluruh satker yang telah disusun melalui *e-Planning* dengan sistem *on line*, serta mengalokasikan anggaran kegiatan ini yang merupakan akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan yang direncanakan dengan mengadakan pertemuan perencanaan tahunan sesuai dengan siklus perencanaan yang di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.

(9) Penyusunan dan Sosialisasi Output Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK)

Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun dan mensosialisasikan output ADIK kepada seluruh unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Kesehatan Provinsi.

(10) Pembinaan Perencanaan ke Daerah

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ke daerah yaitu UPT Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rumah Sakit, serta satker binaannya.dalam rangka Pembinaan Perencanaan Program.

(11) Penyusunan RSB dan RBA BLU

Kegiatan ini merupakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sekaligus melakukan penilaian kinerja Satker UPT Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dimana pada kegiatan ini ada beberapa tahapan yaitu antara lain: Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU, Penyusunan Indikator Keuangan BLU,

Penyusunan Indikator Operasional/pelayanan dan Indikator Mutu Manfaat BLU.

(12) Inventarisasi Dokumen Perencanaan Program.

Kegiatan ini adalah kegiatan dalam mengidentifikasi dokumen-dokumen maupun rekaman-rekaman serta arsip-arsip mana yang masih bisa dikendalikan, atau yang tidak bisa dikendalikan atau dokumen/rekaman/arsip tersebut sudah kadaluwarsa.

Kemudian setelah semua dapat diidentifikasi baru dilakukan penyimpanan di pihak ketiga dengan alasan terbatasnya ruangan/gudang di bagian Program dan Informasi Ditjen Pelayanan Kesehatan.

(13) Verifikasi Data Dukung Usulan Perencanaan Program

Kegiatan ini dilaksanakan setelah berlangsungnya Rapat Perencanaan Program Pelayanan Kesehatan dengan tujuan memverifikasi usulan yang bersumber dari dari APBN. Kegiatan ini melibatkan Direktorat Teknis terkait yaitu Direktorat Pelayanan Primer dan Direktorat Pelayanan Rujukan dan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

(14) Penyiapan bahan RDP dengan DPR

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan bahan - bahan usulan anggaran untuk Rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR R.I

(15) Konsinyasi dan Koordinasi program Pelayanan Kesehatan Tingkat Kementerian.

Kegiatan Konsinyasi ini dilaksanakan dalam kegiatan koordinasi dan kesinambungan Program Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan program-program yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga saling keterkaitan dengan program lain agar tidak terjadi tumpang tindih.

(16) **Penunjang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan.**

Kegiatan Penunjang Teknis dilaksanakan sepanjang tahun dalam rangka menunjang seluruh kegiatan yang berupa penggandaan/foto copy serta alat penunjang perkantoran dan bahan – bahan perkantoran .

(17) **Honor Tim Pengembangan Aplikasi Sipermon**

Kegiatan ini dilakukan dalam mendukung pengembangan program Perencanaan berbasis Aplikasi yang dilakukan bertahap setiap tahun dengan menggunakan aplikasi yang terpadu.

(18) **Penyusunan Juknis Dana Alokasi Khusus.**

Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus dilaksanakan dalam rangka memberikan rambu-rambu dan aturan pelaksanaan kepada SKPD karena pelaksanaan program pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah sesuai kondisi daerah tersebut sehingga pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku

(19) **Rapat Perencanaan (RAPER) Program Pelayanan Kesehatan**

Rapat Perencanaan Anggaran (Raper) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Daerah dalam rangka mensinkronkan usulan perencanaan Dana Alokasi Khusus di bidang pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang diusulkan melalui e Planning yang berkoordinasi dengan oleh Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing, hasil dari pertemuan ini adalah data dasar kondisi rumah sakit dan data Puskesmas di dinas kabupaten/kota tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya pemetaan kondisi daerah tersebut akan disusun menu kegiatan sesuai yang diharapkan oleh masing masing satuan kerja. Untuk pelaksanaannya akan disusun menjadi 4 regional yaitu di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur Bali dan Sulawesi Utara.

(20) **Koordinasi Teknis Rencana Pengembangan Perencanaan Elektronik**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pelayanan kesehatan yang melibatkan Kantor Pusat, UPT Vertikal, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Rumah Sakit Daerah dalam rangka mengevaluasi sistem perencanaan Elektronik serta penyusunan pengembangan perencanaan elektronik. Pertemuan ini dilaksanakan di 4 Regional yaitu Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan yang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota dan Rumah Sakit Daerah. Adapun untuk Kantor Pusat dan UPT Vertikal dilaksanakan di Kepulauan Riau.

(21) **Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)**

Kegiatan yang melibatkan Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Proses ini meliputi kegiatan koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

(22) **Kegiatan Pengembangan Dewan Pengawan Rumah Sakit (Dewas)**

Dewas Rumah Sakit merupakan salah satu persyaratan bila Rumah Sakit ingin mengembangkan diri menjadi Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) . Di dalam Pembinaan Bimbingan Wilayah Direktorat Pelayanan Kesehatan Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, disebutkan bahwa adanya suatu Governing Body (dalam hal ini adalah Dewas) adalah suatu komponen yang akan dinilai dalam survei Penilaian Akreditasi.

Adanya pemutakhiran fungsi dan peran Dewas Rumah Sakit, maka dituntut adanya penyesuaian terhadap regulasi-regulasi baru yang berlaku disertai dengan sosialisasi kepada Rumah Sakit maupun anggota Dewas itu sendiri.

(23) **Advokasi dan Sosialisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pembina Wilayah dalam rangka advokasi dan sosialisasi serta bimbingan Teknis di wilayah Binaannya untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden, Janji Presiden, Quick Win dan Nawa Cita sehingga terealisasi Program yang mendukung visi dan misi tersebut.

(24) **Penyusunan Menu dan Juknis Dekonsentrasi.**

Penyusunan Menu dan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Dekonstrasi dilaksanakan dalam rangka memberikan rambu-rambu dan aturan pelaksanaan kepada Dinkes Provinsi karena pelaksanaan program pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kondisi daerah tersebut sehingga pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

(25) **Penyusunan Usulan Pagu Indikatif**

Kegiatan Penyusunan Usulan Pagu Indikatif dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara penyusunan Anggaran berdasarkan PMK 143.02/2015 dalam pengajuan anggaran, sehingga perlu dilakukan Review oleh Tim APIP K/L dengan melakukan identifikasi kegiatan dan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja tersebut sesuai dengan tupoksi, komponen, rincian kerja dan dokumen data dukung yang ada telah sesuai dengan pagu indikatif.

(26) **Penelaahan dan Reviu Pagu Anggaran Tahun 2017**

Kegiatan Pertemuan Penelaahan dan Reviu Anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara penyusunan Anggaran yang mengacu dengan PMK 143.02/2015 dalam pengajuan anggaran, sehingga perlu dilakukan Review oleh Tim APIP K/L dengan melakukan identifikasi kegiatan dan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja tersebut sesuai dengan tupoksi, komponen, rincian kerja dan dokumen data dukung yang ada telah sesuai sehingga dapat diterbitkan Catatan Hasil Review oleh Inspektorat Jenderal kemudian langkah selanjutnya diterbitkan

Surat Hasil Review untuk diajukan ke Kementerian Keuangan untuk dapat diterbitkan DIPA.

(27) Penelaahan dan Reviu Alokasi Anggaran

Kegiatan Penelaahan dan Alokasi Anggaran adalah semua Unit Kementerian Lembaga sesuai tata cara penyusunan anggaran yang mengacu dengan PMK 143/PMK.02/2015 dalam pengajuan anggaran, sehingga perlu dilakukan Review oleh Tim APIP K/L dengan melakukan identifikasi kegiatan dan anggaran yang dilakukan Satuan Kerja tersebut sesuai dengan Tupoksi, komponen, rincian kerja dan dokumen data dukung yang ada telah sesuai sehingga dapat diterbitkan Catatan Hasil Pevieu oleh Inspektorat Jenderal. Kemudian langkah selanjutnya dapat diajukan ke Kementerian Keuangan untuk dapat diterbitkan DIPA.

(28) Penelaahan dan Reviu APBN Perubahan

Kegiatan Penelaahan dan reviu APBN Perubahan adalah semua Unit Kementerian Lembaga sesuai tata cara revisi anggaran yang mengacu dengan PMK 15/PMK.02/2016, sehingga perlu dilakukan Review oleh Tim APIP K/L dengan melakukan identifikasi kegiatan dan anggaran yang dilakukan Satuan Kerja tersebut sesuai dengan Tupoksi, komponen, rincian kerja dan dokumen data dukung yang ada telah sesuai sehingga dapat diterbitkan Catatan Hasil Pevieu oleh Inspektorat Jenderal. Kemudian langkah selanjutnya dapat diajukan ke Kementerian Keuangan untuk dapat diterbitkan DIPA.

(29) Rekonsiliasi Anggaran

Kegiatan Rekonsiliasi Anggaran adalah untuk menyamakan persepsi antara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam penyusunan anggaran tahun anggaran 2017.

(30) **Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran**

Sosialisasi tata cara revisi anggaran adalah pertemuan antara satker-satker di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam menyampaikan tata cara dan peraturan-peraturan dalam hal melakukan revisi anggaran.

(31) **Penyusunan Revisi Pedoman Remunerasi BLU**

Kegiatan Penyusunan Revisi Pedoman Remunerasi BLU adalah pertemuan antara satker-satker BLU di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Kementerian Keuangan dalam menyusun besaran remunerasi di masing-masing satker BLU di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.

(32) **Monitoring Pelaksanaan Remunerasi Satker BLU Ditjen Pelayanan Kesehatan**

Kegiatan Pelaksanaan Remunerasi Satker BLU Ditjen Pelayanan Kesehatan adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan remunerasi di satker badan layanan umum di unit pelaksana teknis vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan. Apakah pelaksanaan remunerasi pada satker BLU UPT Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Remunerasi.

(33) **Pertemuan Penguatan Tim Remunerasi**

Kegiatan Pertemuan Penguatan Tim Remunerasi adalah Pertemuan antara Tim Remunerasi Kementerian Keuangan dengan Tim Remunerasi Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI untuk membicarakan tentang kebijakan pembekalan tim remunerasi untuk pelaksanaan remunerasi pada satker BLU di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

(34) **Penunjang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran**

Kegiatan Penunjang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran adalah kegiatan belanja barang untuk persediaan operasional kegiatan sub.bag anggaran seperti penggandaan, dan belanja barang operasional lainnya.

(35) **Penyusunan Pola tarif Rumah sakit**

Kegiatan Penyusunan Pola Tarif adalah untuk menyusun tarif rumah sakit baik satker BLU maupun non BLU terutama klas III di setiap Rumah Sakit, penyusunan Tarif tersebut disusun atas dasar usulan dari Satker Rumah Sakit yang kemudian usulan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan .

(36) **Pertemuan Penyusunan Target dan Pagu PNBP Ditjen Yankes**

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI terus melakukan penyempurnaan dalam sistem penganggaran melalui pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka penganggaran jangka menengah.

Terkait sistem pengelola keuangan negara tidak terlepas dari peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusi PNBP dalam APBN pada setiap tahun anggaran semakin besar peranannya dalam membiayai pembangunan

Sehubungan dalam hal tersebut maka perlu dilakukan penyusunan target dan pagu PNBP dan Pembinaan terhadap para pengelola keuangan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pelayanan Kesehatan agar tercipta administrasi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran baik yang bersumber dari RM maupun PNBP.

(37) Pembinaan Penyusunan Target dan Pagu PNBP Ditjen Pelayanan Kesehatan

Pembinaan Penyusunan Target dan Pagu PNBP kegiatan tersebut untuk melakukan penyusunan PNBP bagi satker BLU maupun Satker Non BLU Ditjen Palayanan Kesehatan

(38) Pertemuan Permutakhiran Data IKI/IKT 2017 melalui aplikasi E-Kinerja

Kegiatan Pertemuan Permutakhiran Data IKI/IKT adalah kegiatan pertemuan pada Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur dan Kepala Balai tahun 2017 dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun 2017 meliputi penandatanganan kontrak kinerja IKI antara Direktur RS/Kepala Balai dan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Penandatanganan Kontrak Indikator Kinerja Terpilih (IKT) antara Direktur RS/Kepala Balai dengan Direktur PPK BLU Kementerian Keuangan, Sosialisasi, penggunaan aplikasi, E kinerja dan penyusunan laporan.

(39) Pelaksanaan Anggaran Lintas Program/Lintas Sektor

Perbendaharaan Negara Adalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBNAPBD.

Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap keuangan negara harus dilakukan pertanggungjawabannya oleh para pejabat/satker yang mengelola keuangan negara. Untuk itu agar pertanggungjawaban pengelola keuangan tersebut dapat tersusun tepat waktu dan berkualitas baik perlu dilakukan pertemuan antar satker-satker yang mengelola dan pertanggungjawaban keuangna negara sebagai mana yang diuraikan diatas.

- (40) **Penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran** adalah kegiatan pertemuan untuk menyusun standar biaya masukan dan keluaran untuk satker baik satker BLU maupun Non BLU dan juga Standar Masukan dilingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan. Hasil dari kegiatan ini akan diusulkan kepada Kementerian Keuangan yang pada akhirnya tersusun standar Biaya Masukan untuk menyusun Standar Biaya tahun anggaran 2018
- (41) **Monitoring dan Evaluasi IKI/IKT 2017** Kegiatan Monitoring dan Evaluasi IKI/IKT 2017 adalah Dasar PPK BLU melakukan pembayaran remunerasi untuk Diektur dan Direksi RS/Balai. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Tim PPK BLU Kementerian Keuangan. Kegiatan tersebut melihat langsung di lapangan dari hasil laporan IKI yang disampaikan ke Sesditjen Pelayanan Kesehatan dan PPK BLU Kementerian Keuangan.
- (42) **Pemantauan Indikator Kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan** Kegiatan ini adalah kegiatan pemantauan terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan melalui dokumen–dokumen perencanaan nasional (RPJMN, Renstra, RKP, Prioritas Nasional dll), yang merupakan indikator kinerja dari Ditjen Pelayanan Kesehatan, output dari kegiatan ini adalah data dan informasi capaian program dan kegiatan Ditjen Pelayanan kesehatan secara periodik sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan berkesinambungan kepada pimpinan, selain itu dari kegiatan ini dapat dipetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, sehingga diharapkan pimpinan dapat memberikan advokasi dan intervensi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

(43) Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan di daerah

Kegiatan ini adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di daerah. Pelaku /stakeholder pelaksana Program Pelayanan Kesehatan berada di seluruh Indonesia, hal itu mengakibatkan pelaporan capaian/hasil pelaksanaan kegiatan tidak optimal. kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut berikut permasalahan-permasalahan yang terjadi.

(44) Penyusunan Bahan Lampiran Pidato Presiden

Adalah kegiatan penyusunan bahan dari bagian lampiran pidato presiden bidang kesehatan yang berisi capaian kinerja Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen BUK dan juga berisi kegiatan – kegiatan unggulan/ inovatif yang akan disampaikan oleh presiden dalam pidato kenegaraan

(45) Evaluasi Kegiatan Bersumber PHLN

Kegiatan ini adalah kegiatan yang menyajikan laporan hasil dari pemantauan dan evaluasi di lapangan dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana PHLN yang telah dilaksanakan oleh Satker
Kegiatan ini secara umum untuk memantau dan mengevaluasi dari sisi permasalahan/kendala yang terjadi baik disaat pelaksanaan dan pelaporan, sisi pemanfaatan dana oleh satker, dan sisi keefektifan anggaran yang telah diterima oleh satker, sehingga dari data-data tersebut nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian baik tidaknya pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana PHLN terhadap Satker penerima pada tahun anggaran berjalan

(46) Penyusunan dan revidi laporan Akuntabilitas Kinerja

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja dari Ditjen pelayanan kesehatan, hal ini bertujuan untuk

menghasilkan laporan tingkat keberhasilan program selama 1 tahun anggaran secara akuntabel.

(47) Pertemuan Koordinasi Monev Program Pelayanan Kesehatan

Adalah kegiatan untuk melakukan pertemuan koordinasi dengan UPT Vertikal dan Dinkes Provinsi selaku pelaksana program pelayanan kesehatan, sehingga dihasilkan suatu laporan capaian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan yang akurat, tepat waktu dan terukur.

(48) Workshop Implementasi SIMRS

Adalah workshop yang diperuntukan bagi rumah sakit untuk mengimplementasikan SIMRS khususnya terkait SIMRS GOS yang dimiliki Kementerian Kesehatan. Selain itu workshop digunakan untuk menyusun standarisasi SIMRS serta masukan dan evaluasi dari rumah sakit dalam rangka pengembangan SIMRS.

(49) Pembinaan Dalam Rangka Sistem Informasi

Adalah kegiatan pembinaan terhadap satker yang menggunakan sistem informasi khususnya rumah sakit yang menggunakan SIMRS GOS

(50) Sinkronisasi data dan validasi data Rumah Sakit Tahun 2018

Adalah kegiatan bagi Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit untuk mensinkronisasi dan memvalidasi data dasar Rumah Sakit yang ada di wilayahnya yang ada di dalam Aplikasi RS Online serta data dari SIRS tahun 2018

(51) Penyajian Profil Fasilitas Kesehatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2017

Adalah kegiatan yang ditujukan bagi Bagian Program dan Informasi di setiap Unit Eselon I dan Badan di Kementerian Kesehatan, serta bagi setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk memberikan data dan informasi programnya untuk kemudian dikompilasi menjadi sebuah profil yang

dapat digunakan sebagai bahan referensi kunjungan kerja oleh pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

(52) Pengelolaan SIRS Rev.7

Adalah kegiatan yang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit dan setiap Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan tujuan mengevaluasi draft revisi format pelaporan rumah sakit untuk disesuaikan dengan kebutuhan data di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan memperhatikan ketersediaan data di rumah sakit sehingga memudahkan rumah sakit dalam pengumpulan dan pelaporan data SIRS untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaporan data rumah sakit.

(53) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

adalah kegiatan dukungan terhadap manajemen eselon I meliputi pengadaan alat pengolahan data dan pengembangan aplikasi – aplikasi yang dibutuhkan sebagai alat bantu (*tools*) analisa dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

3) Permasalahan

- Terdapat 2 paket Pengadaan Sistem Informasi yang tidak dapat direalisasikan karena anggaran untuk 2 pengadaan tersebut baru keluar di akhir tahun, sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya.
- Masih adanya perbedaan persepsi cara pengumpulan dan perhitungan data capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT) di kantor daerah.
- Masih kurangnya koordinasi internal dalam pelaksanaan SIPERMON
- Anggaran refocusing untuk pengembangan SIMRS dan Dashboard tidak disetujui.

4) Upaya Pemecahan Masalah

- Meningkatkan koordinasi lebih efektif dengan unit terkait dalam proses dan tahapan pengadaan sistem informasi
- Melaksanakan sosialisasi Pedoman penyusunan IKI dan IKT
- Melaksanakan monev capaian IKI dan IKT secara berkala
- Menyusun regulasi pemberlakuan SP2RS secara nasional.
- Meningkatkan koordinasi internal.

5) Realisasi Anggaran

Bagian Program dan Informasi pada tahun 2016 mendapatkan alokasi awal sebesar Rp. 21.103.016.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.299.531.452,- (63,02%)

b. Bagian Hukum, Organisasi dan Humas

1) Sasaran Indikator/Kegiatan

Terlaksananya pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana serta advokasi hukum dan humas.

2) Pencapaian

Kegiatan Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat merupakan dukungan manajemen yang meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan organisasi dan tatalaksana serta pelayanan advokasi hukum dan humas. Secara keseluruhan seluruh kegiatan yang merupakan sub komponen, dapat dilaksanakan dengan pencapaian 100 %. Pencapaian dari kegiatan tersebut adalah :

- a. terselesaikannya 25 draft rancangan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya difinalisasi oleh Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
- b. Proses penataan organisasi UPT sudah selesai di internal Ditjen Pelayanan Kesehatan, untuk selanjutnya diproses oleh Biro Hukum

dan Organisasi untuk pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB.

- c. Telaksananya proses internalisasi nilai-nilai revolusi mental bidang kesehatan di 10 (sepuluh) rumah sakit vertikal, yang diselenggarakan secara integrasi antara Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan, serta konsultan.
- d. Pengembangan aplikasi Berita Yankes dan Warta Yankes melalui android dan ios.

Tabel 6. Pencapaian Bagian Hukormas Tahun 2017

NO	SUB BAGIAN	ALOKASI	REALISASI	%
A	SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.490.108.000	2.782.902.862	79,74
B	SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA	1.938.130.000	1.712.108.089	88,34
C	SUBBAGIAN ADVOKASI HUKUM DAN HUMAS	5.003.116.000	4.764.997.767	95,24
	JUMLAH	10.431.354.000	9.260.008.718	88,77

3) Permasalahan

- Tidak terpenuhinya target 40 draft Permenkes dikarenakan adanya beberapa Draft Permenkes yang dikembalikan ke Unit Teknis untuk perbaikan dan penambahan substansi.
- Ada beberapa permenkes yang perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan serta untuk mendukung peraturan yang di atasnya.

- Kurangnya koordinasi dari unit kerja lain yang memerlukan keterlibatan Bagian Hukormas, sehingga kesulitan dalam mengalokasikan anggaran karena sudah direvisi.
- Dalam pengisian analisis beban kerja melalui *online* belum optimal dan seluruh kegiatan dapat diinput, hal ini disebabkan aplikasi yang dikembangkan oleh penyedia layanan (Biro Hukor dan Biro Kepegawaian) belum optimal.
- Belum optimalnya partisipasi satuan kerja di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan untuk memberikan kontribusi pemberitaan dalam web Ditjen Pelayanan Kesehatan

4) Usulan Pemecahan Masalah

- Dilaksanakannya rapat pertemuan untuk menyusun, dan menyelesaikan draft permenkes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- Perlu adanya sinkronisasi kegiatan antara Bagian Hukormas dengan kerja terkait, sehingga pembiayaan dapat teralokasi.
- Untuk melakukan pembahasan yang lebih intensif antara penyedia aplikasi Analisis Beban Kerja dengan unit kerja eselon I lainnya
- Perlu adanya koordinasi dengan unit kerja lain sehingga pemberitaan dan informasi di web Ditjen Pelayanan Kesehatan lebih banyak lagi

5) Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Bagian Hukum, Organisasi dan Humas tahun 2017 setelah efisiensi sebesar Rp. 10.431.354.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.260.008.718,- atau 88,77 %.

c. Bagian Keuangan

1) Sasaran/Indikator Kegiatan

Terlaksananya pengelolaan urusan keuangan dan barang milik Negara

2) Pencapaian

Tabel 7 Pencapaian Bagian Keuangan dan BMN Tahun 2017

NO.	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)		ANGGARAN		
		TARGET	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	%
	SUBAG PERBENDAHARAAN					
1	Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan Dalam Bidang Perbendaharaan (Diklat Bendahara Pengeluaran Tahap Persiapan)	1 Dokumen	1 Dokumen	8,152,000	8,043,900	98.67%
2	Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan Dalam Bidang Perbendaharaan (Diklat Bendahara Pengeluaran Pelaksanaan Diklat)	1 Dokumen	1 Dokumen	321,950,000	318,632,611	98.97%
3	Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan Dalam Bidang Perbendaharaan (Diklat Bendahara Pengeluaran Evaluasi Diklat)	1 Dokumen	1 Dokumen	27,796,000	27,101,200	97.50%
4	Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan Dalam Bidang Perbendaharaan (Diklat Bendahara Penerimaan Tahap	1 Dokumen	1 Dokumen	2,766,000	2,224,300	80.42%

	Persiapan)					
5	Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan Dalam Bidang Perbendaharaan (Diklat Bendahara Penerimaan Pelaksanaan Diklat)	1 Dokumen	1 Dokumen	311,970,000	308,783,153	98.98%
6	Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan Dalam Bidang Perbendaharaan (Diklat Bendahara Penerimaan Evaluasi Diklat)	1 Dokumen	1 Dokumen	3,696,000	3,291,600	89.06%
7	Koordinasi Bidang Perbendaharaan di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan	1 Laporan	1 Laporan	69,410,000	49,688,825	71.59%
8	Bimbingan Teknis Perbendaharaan	19 Laporan	16 Laporan	329,540,000	298,230,264	90.50%
9	Pembinaan Dewan Pengawas (Pembekalan Dewas Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran)	1 Dokumen	1 Dokumen	337,946,000	329,559,500	97.52%
10	Pembinaan Dewan Pengawas (Evaluasi Pelaksanaan dan Pendampingan Dewas)	1 Dokumen	1 Dokumen	287,682,000	246,648,534	85.74%
11	Pertemuan Evaluasi Penyerapan PNBPN di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	264,300,000	250,295,000	94.70%
12	Tata Usaha Keuangan (Validasi Data Keuangan dan BMN (Samsat Pelaksanaan Anggaran Bagian Keuangan dan BMN))	12 Laporan	12 Laporan	394,300,000	368,836,891	93.54%

13	Tata Usaha Keuangan (Koordinasi Lintas Program/Sektor)	28 Laporan	22 Laporan	341,992,000	286,127,752	83.67%
14	Tata Usaha Keuangan (Penyusutan Arsip Bagian Keuangan dan BMN)	1 Laporan	1 Laporan	197,700,000	194,616,256	98.44%
15	Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan Itjen	14 Laporan	12 Laporan	848,574,000	768,619,105	90.58%
16	Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan	28 Laporan	22 Laporan	500,080,000	434,148,600	86.82%
17	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	413,520,000	413,520,000	100.00%
JUMLAH				4,661,374,000	4,308,367,491	92.43%
SUBAG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI						
A	Penyelenggaraan Akt. Keu (SAK) Dan Penyusunan Lapkeu Dan BMN UAPPA/B- E1 Ditjen Yankes (Penyusunan Lapkeu Dan BMN Tahun 2016)	89 DOKUMEN	89 DOKUMEN	1,295,381,000	1,262,337,818	97.45%
B	Penyelenggaraan Akt. Keu (SAK) Dan Penyusunan Lapkeu Dan BMN UAPPA/B- E1 Ditjen Yankes (Penyusunan Lapkeu Dan BMN Semester I Tahun 2017)	89 DOKUMEN	89 DOKUMEN	924,200,000	908,377,000	98.29%
C	Penyelenggaraan Akt. Keu (SAK) Dan Penyusunan Lapkeu Dan BMN UAPPA/B- E1 Ditjen Yankes (Penyusunan Lapkeu Dan	110 DOKUMEN	110 DOKUMEN	385,740,000	361,038,000	93.60%

	BMN Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2017)					
D	Penyelenggaraan Akt. Keu (SAK) Dan Penyusunan Lapkeu Dan BMN UAPPA/B-E1 Ditjen Yankes (Pengumpulan Data Daerah Dan Feedback Lapkeu Audited 2016)	5 PROVINSI	5 PROVINSI	65,160,000	64,107,800	98.39%
E	Penyelenggaraan Akt. Keu (SAK) Dan Penyusunan Lapkeu Dan BMN UAPPA/B-E1 Ditjen Yankes (Support Data Penyusunan Lap. Keu. Kemenkes Bersama Biro Keuangan Dan BMN)	8 DOKUMEN	8 DOKUMEN	384,480,000	263,019,600	68.41%
F	Penyelenggaraan Akt. Keu (SAK) Dan Penyusunan Lapkeu Dan BMN UAPPA/B-E1 Ditjen Yankes (In House Training Penyusunan Laporan Keuangan Dan Laporan BMN)	1 LAPORAN	1 LAPORAN	97,843,000	83,005,000	84.83%
G	Penyelenggaraan Akt. Keu (SAK) Dan Penyusunan Lapkeu Dan BMN UAPPA/B-E1 Ditjen Yankes (Samsat Penyusutan Satker Non Aktif)	3928 ADK TP	3928 ADK TP	404,600,000	367,630,000	90.86%
H	Lintas Program/Lintas Sektor Kegiatan Sekretariat Ditjen Yankes	24 LAPORAN	9 LAPORAN	213,088,000	76,245,800	35.78%
L	Pengumpulan Data Dan Percepatan Penyelesaian Piutang Dan Utang (Pendampingan Pengelolaan	26 LAPORAN	21 LAPORAN	369,304,000	271,518,400	73.52%

	Laporan Piutang Dan Utang)					
M	Sosialisasi Pedoman Akuntansi Biaya (Workshop)	1 LAPORAN	1 LAPORAN	202,164,000	177,937,850	88.02%
JUMLAH				4,341,960,000	3,835,217,268	88.33%
SUBBAG PENGELOLAAN BMN						
A	Fasilitasi Usulan Penghapusan BMN dilingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	294,000,000	257,779,232	85.81%
B	Penyelesaian Masalah Administrasi & Percepatan Hibah BMN Dilingkungan Ditjen Yankes (Pertemuan 3 Regional Proses Percepatan Hibah BMN)	3 Dokumen	3 Dokumen	2,722,114,000	2,636,424,024	98.15%
C	Penyelesaian Masalah Administrasi & Percepatan Hibah BMN Dilingkungan Ditjen Yankes (Inventarisasi & Cek Fisik Dalam Rangka Pembinaan & Percepatan Hibah BMN)	1 Dokumen	1 Dokumen	215,260,000	164,928,000	76.76%
D	Penyelesaian Masalah Administrasi & Percepatan Hibah BMN Dilingkungan Ditjen Yankes (Asistensi Penyelesaian Masalah BMN)	1 Dokumen	1 Dokumen	213,900,000	167,176,764	70.79%
E	Pelaksanaan BMN Lintas Program/Lintas Sektor	1 Dokumen	1 Dokumen	156,595,000	118,431,600	84.48%
F	Validasi Administrasi BMN (Samsat Penyelesaian Administrasi BMN)	1 Dokumen	1 Dokumen	55,060,000	54,239,736	98.51%

G	Pengumpulan Dan Support Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN Dan Pendampingan Penatausahaan BMN Di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	44,738,000	43,476,500	97.18%
H	Penyusunan Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2017	1 Dokumen	1 Dokumen	195,750,000	183,220,000	92.60%
I	Pengadaan Alat Pengolah Data	20 Unit	20 Unit	216,835,000	216,834,246	100.00%
J	Aplikasi Monitoring BMN Subag BMN	1 Buah	1 Buah	50,000,000	49,500,000	99.00%
JUMLAH				4,164,252,000	3,918,322,602	94.09%
JUMLAH TOTAL BAGIAN KEUANGAN DAN BMN				13,167,586,000	12,061,907,361	91.60%

Capaian Bagian Keuangan dan BMN dapat dijabarkan dengan hasil sebagai berikut:

- a) Pelayanan Perbendaharaan (057), keseluruhan Kegiatan dapat terlaksana dengan hasil sebagai berikut :
 - (1) Terselenggaranya Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan Dalam Bidang Perbendaharaan (Diklat Bendahara Pengeluaran) target yang di capai 1 laporan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai yang menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Calon Bendahara Pengeluaran sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai peraturan yang berlaku dengan teliti dan akuntabel dan siap melaksanakan Ujian Sertifikasi Bendahara sesuai Perpres No 7 Tahun 2016.
 - (2) Terselenggaranya Peningkatan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan Dalam Bidang Perbendaharaan (Diklat Bendahara Penerimaan) target

yang di capai 1 laporan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai yang menduduki jabatan Bendahara Penerimaan/Calon Bendahara Penerimaan sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerimaan sesuai peraturan yang berlaku dengan teliti dan akuntabel dan siap melaksanakan Ujian Sertifikasi Bendahara sesuai Perpres No 7 Tahun 2016.

- (3) Terselenggaranya Koordinasi Bidang Perbendaharaan di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan tercapai 1 laporan adalah tersusunnya laporan keuangan pertanggungjawaban pengelola keuangan Negara tepat waktu, benar dan berkualitas baik, meningkatnya kemampuan para pengelola pertanggungjawaban keuangan Negara, meningkatkan pemahaman dan keahlian Petugas Pengelola Keuangan di Lingkungan Setditjen BUK hasil yang dicapai Para Pengelola Keuangan dapat lebih mahir, handal dan cermat dalam bidang Pertanggungjawaban.
- (4) Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perbendaharaan tercapai 1 laporan bertujuan untuk mengawal kesesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran/pelaksanaan anggaran yang ada di satker agar dapat melakukan rewiu dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran serta dapat melakukan perencanaan pelaksanaan anggaran dan perencanaan capaian output yang efektif di tahun anggaran 2017 sesuai peraturan dan pedoman perencanaan pelaksanaan anggaran yang ada. Diharapkan dengan adanya kegiatan bimbingan teknis ini dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja satker dilingkungan Satker Yankes dan juga dapat mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang terkait pelaksanaan anggaran di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
- (5) Terselenggaranya Pembinaan Dewan Pengawas (Pembekalan Dewas Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran) dengan target capaian 1 laporan dimaksud bertujuan memberikan pembekalan kepada Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsinya dalam mengelola BLU.
- (6) Terselenggaranya Pembinaan Dewan Pengawas (Evaluasi Pelaksanaan dan Pendampingan Dewas) dengan target capaian 1 laporan dimaksud bertujuan memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan dan pendampingan Dewan Pengawas selama satu tahun anggaran.

- (7) Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Penyerapan PNBPN di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan target capaian 1 laporan bertujuan mengevaluasi penyerapan PNBPN di lingkungan Ditjen Pelayanan tiap semesternya.
- (8) Terselenggaranya Tata Usaha Keuangan (Validasi Data Keuangan dan BMN (Samsat Pelaksanaan Anggaran Bagian Keuangan dan BMN)) dengan target capaian 1 laporan dengan tujuan pembuktian terhadap data-data keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang bersumber dari dana APBN. Sehingga dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara pada Kementerian Kesehatan RI khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Validasi Data Keuangan dan BMN (Samsat Pelaksanaan Anggaran Bagian Keuangan dan BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan agar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (9) Terselenggaranya Tata Usaha Keuangan (Koordinasi Lintas Program/Sektor) dengan target capaian 1 laporan dengan tujuan agar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tersebut dapat tersusun tepat waktu dan berkualitas perlu dilakukan koordinasi antar pengelola keuangan satker pusat dan daerah yang melaksanakan pertanggungjawaban keuangan negara.
- (10) Terselenggaranya Tata Usaha Keuangan (Penyusutan Arsip Bagian Keuangan dan BMN) dengan hasil Berita Acara Penyusutan Arsip.
- (11) Terselenggaranya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan Itjen dengan target 14 laporan adalah Jumlah Laporan Hasil Pertemuan dengan Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang terdapat hasil rekomendasi APF tersebut.
- (12) Terselenggaranya Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan dengan target 28 Jumlah Data yang dikumpulkan dari Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF) terkait dan dinyatakan selesai sesuai saran dan hasil yang dicapai adalah 22 Laporan.

- (13) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Anggaran target yang telah dicapai dalam 12 dokumen adalah terbayarnya Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016 sesuai dengan besarnya dan tepat pada waktunya
- b) Pelayanan Verifikasi dan Akuntansi (058), keseluruhan Kegiatan dapat terlaksana dengan hasil sebagai berikut:
- (1) Terselenggaranya Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tahun 2017 sebanyak 2 trip dan Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Audited yang menghasilkan 1 dokumen berupa laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - (2) Terselenggaranya Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan I Tahun 2017 yang menghasilkan 1 dokumen berupa laporan Keuangan Triwulan I Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - (3) Terselenggaranya Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I Tahun 2017 yang menghasilkan 1 dokumen berupa laporan Keuangan Semester I Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - (4) Terselenggaranya Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III Tahun 2017 yang menghasilkan 1 dokumen berupa laporan Keuangan Triwulan III Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - (5) Terselenggaranya In House Training Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN bersama Kantor Pusat dan UPK Kemenkes yang menghasilkan penambahan kompetensi Petugas SAIBA dan Petugas SIMAK BMN Kantor Pusat dan UPK Kemenkes dalam menyusun Laporan Keuangan dan BMN;
 - (6) Terselenggaranya Samsat Penyusutan Satker Non Aktif atas 982 satker TP dan UB selama 2 trip (Semester I dan Semester II) yang menghasilkan data keuangan Satker Non Aktif yang sesuai dengan prosedur penyusutan yang berlaku terhadap satker tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dan terkompilasi ke data keuangan Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi ke data keuangan e-rekon Kementerian Keuangan;

- (7) Pendampingan atas Laporan Piutang dan Utang Satker Kantor Daerah sesuai instrumen yang ada yang menghasilkan Laporan Piutang dan Utang Satker Kantor Daerah yang sesuai dengan format baku yang diminta oleh Kementerian Keuangan;
 - (8) Workshop Pedoman Akuntansi Biaya kepada 49 satker Kantor Daerah yang menghasilkan penambahan pemahaman satker Kantor Daerah dalam mempraktikkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep Akuntansi Biaya.
- c) Pengelolaan BMN (059), keseluruhan Kegiatan dapat terlaksana dengan hasil sebagai berikut:
- (1) Fasilitasi Usulan Penghapusan BMN di Lingkungan Ditjen Yankes yang menghasilkan 1 dokumen seperti SK Panitia Penghapusan BMN, Rekomendasi Persetujuan Penghapusan BMN, dan SK Penghapusan BMN Satker Vertikal.
 - (2) Penyelesaian Masalah Administrasi & Percepatan Hibah BMN Dilingkungan Ditjen Yankes (Pertemuan 3 Regional Proses Percepatan Hibah BMN) yang menghasilkan 1 dokumen seperti Usulan Hibah (Penerimaan hibah yang berasal dari dana DK/TP sebelum dan sesudah tahun 2011) untuk mengeluarkan persetujuan dan SK Penghapusan secara Hibah.
 - (3) Penyelesaian Masalah Administrasi & Percepatan Hibah BMN Dilingkungan Ditjen Yankes (Inventarisasi & Cek Fisik Dalam Rangka Pembinaan & Percepatan Hibah BMN) yang menghasilkan 1 dokumen hasil Inventarisasi BMN dan Cek Fisik BMN dengan tindaklanjut Penghapusan BMN.
 - (4) Penyelesaian Masalah Administrasi & Percepatan Hibah BMN Dilingkungan Ditjen Yankes (Asistensi Penyelesaian Masalah BMN) yang menghasilkan 1 dokumen seperti Identifikasi Permasalahan Aset dan melakukan pembinaan penatausahaan BMN.
 - (5) Pelaksanaan BMN Lintas Program/Lintas Sektor yang menghasilkan 1 dokumen hasil rekonsiliasi data BMN seperti Hibah DK/TP atau

Dropping, PSP, Rumah Negara, Penghapusan BMN dan Permasalahan Aset bersama Biro Keuangan Setjen Kemenkes dan Biro Hukum & Organisasi Setjen Kemenkes.

- (6) Validasi Administrasi BMN (Samsat Penyelesaian Administrasi BMN) yang menghasilkan 1 dokumen hasil pemeriksaan data-data Administrasi BMN seperti data hibah TP/DK/Dropping, Penatausahaan BMN dan Permasalahan Aset dengan cara memastikan apakah data tersebut sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, agar dapat ditindaklanjuti.
- (7) Pengumpulan Dan Support Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN Dan Pendampingan Penatausahaan BMN Di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang menghasilkan 1 dokumen berupa laporan SIMAK BMN untuk Semester I dan Semester II.
- (8) Penyusunan Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2017 yang menghasilkan 1 dokumen perencanaan kebutuhan BMN atas pemeliharaan dan pengadaan BMN yang sudah sesuai standar yang berlaku.
- (9) Pengadaan Alat Pengolah Data yang menghasilkan 1 dokumen kontrak pengadaan untuk pembelian Alat Pengolah Data sebanyak 20 unit berupa PC, Laptop, Printer dan Scan untuk menunjang kinerja pegawai.
- (10) Aplikasi Monitoring BMN Subag BMN yang menghasilkan 1 Aplikasi Monitoring BMN seperti Hibah BMN, Penghapusan BMN dan Penetapan Status Pengguna BMN.

3) Permasalahan

- a) Kurangnya SDM pada Subbag Perbendaharaan dengan beban kerja yang ada pada subbag perbendaharaan.
- b) Kurangnya SDM pada Subbag Pengelolaan BMN, dengan staf yang ada, antara jumlah beban kerja dan jumlah satker yang kurang lebih 1.161 satker sangat tidak proporsional.
- c) Data Keuangan yang masih berubah karena terjadi perubahan data Piutang terutama Piutang BPJS dan Utang;
- d) Masih ada dispensasi pengesahan SP3BLU sampai bulan Februari;
- e) Satker masih melakukan revisi POK, hal ini disebabkan terdapat Pagu Minus dalam Laporan Realisasi Belanja;

- f) Satker masih ada yang salah dalam melakukan penganggaran terutama di Belanja Barang dan Belanja Modal;
- g) SAIBA sudah berbasis akrual sehingga Laporan Keuangan Badan Layanan Umum bisa hanya satu Laporan Keuangan namun untuk penilaian kinerja, SAIBA belum sepenuhnya mendukung;
- h) Muncul BAS (Bagan Akun Standar) baru yang belum terakomodasi dalam SAIBA;

4) Upaya Pemecahan Masalah

- a) Penambahan SDM pada Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan BMN sesuai ABK Pegawai (point a dan b)
- b) Perubahan data diusulkan dalam jurnal koreksi atas Laporan Keuangan Unaudited (untuk permasalahan point c, d, dan e);
- c) Pada saat penyusunan anggaran, satker sebaiknya berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran, Petugas Simak BMN, dan Petugas SAIBA, sehingga penggunaan akun belanja sesuai dengan kebutuhan (untuk permasalahan point f);
- d) Akan dilakukan pembahasan oleh Kementerian Keuangan untuk mengakomodasi Laporan Kinerja BLU pada SAIBA (untuk permasalahan point g);
- e) Menunggu Kementerian Keuangan mengupdate SAIBA yang mengakomodasi BAS (Bagan Akun Standar) baru (untuk permasalahan point h).

5) Realisasi Anggaran

Bagian Keuangan dan BMN pada tahun 2017 mendapatkan alokasi sebesar Rp.13,167,586,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12,061,907,361,- (91.6%)

d. Bagian Kepegawaian dan Umum

1) Sasaran Indikator / Kegiatan

Terlaksananya pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan ,arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan.

2) Pencapaian

Tabel 8 Pencapaian Bagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2017

No	Kegiatan	Keluaran			Anggaran		
		Target	Capaian	%	Alokasi setelah efisiensi & self blocking	Realisasi	%
1	Workshop Kepegawaian	5 Lap	4 Lap	80	1.041.641.000	941.605.600	90
2	Sidang Tim Penilai	8 Lap	8 Lap	100	1.546.266.000	1.525.278.500	99
3	Regionalisasi Panduan Penyusunan PAK	1 Dok	1 Dok	100	79.800.000	59.856.333	75
4	Pengembangan Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	100	126,525.000	122.781.900	97
5	Monitoring, Bimbingan & Evaluasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	100	214.200.000	213.572.900	99
6	Workshop Layanan Pengadaan	1 Lap	1 Lap	100	207.420.000	177.643.000	86
7	Penyusunan NSPK dan e- Catalogue	1 lap	1 lap	100	262.390.000	261.390.000	99,6
8	Monitoring, Bimbingan dan Evaluasi Pengadaan	1 Dok	1 Dok	100	122.850.000	117.776.300	96
9	Workshop Ketatausahaan & Rumah Tangga	3 Lap	3 Lap	100	660.750.000	659.343.751	99,7
10	Inventarisasi Kearsipan	5 Lap	5 Lap	100	1.063.050.000	1.062.093.000	99,9
11	Lintas program/lintas sektor kegiatan Bagian Kepegawaian dan Umum	1 Dok	1 Dok	100	918.450.000	826.917.070	90
12	Monitoring, Bimbingan & Evaluasi Ketatausahaan & RT	1 Lap	1 Lap	100	211.500.000	211.220.867	99,8
13	Rapat Kerja di lingkungan Ditjen Yankes	1 Dok	-	0	396.256.000	383.100.000	99
14	Lintas sektor/lintas program kegiatan Ditjen Yankes	1 Dok	-	0	702.144.000	285.594.150	41
15	Transformasi Budaya Kerja	1 Lap	1 Lap	100	685.995.000	683.901.000	99,6
16	Penyusunan Laporan dan rencana Kegiatan Bagian kepum	1 Dok	1 Dok	100	450.000.000	440.364.850	97,8
17	Pengadaan APD	2 Dok	1 Dok	50	1.406.000.000	885.975.000	63
18	Pengadaan Peralatan & Fasilitas Perkantoran	1 Lap	1 Lap	100	1.292.450.000	767.587.300	59
19	Pengadaan mebelair ruang rapat	1 Lap	-	0	1.339.050.000	0	0
20	Pengadaan Peralatan Ruang Record Centre	1 Lap	-	0	712.000.000	0	0

21	Renovasi Ruang Kantor	1 Dok	1 Dok	100	1.992.000.000	1.991.200.000	100
22	Renovasi Rumah Dinas Jabatan	1 Dok	-	0	2.127.000.000	125.928.000	6
23	Layanan kantor	12 bln	12 bln	100	11.404.190.000	10.547.952.205	92

Pada tahun 2017 Bagian Kepegawaian dan Umum melaksanakan 23 kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

(1) Workshop Kepegawaian meliputi workshop :

- Workshop Validasi berkas Kenaikan Pangkat Fungsional Periode April 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Workshop Manajemen Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Hasil yang dicapai dari workshop ini adalah:
 - peserta terpapar tentang arah pengembangan jabatan fungsional kesehatan dan *grand design* yang dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK) terkait pengembangan jabatan fungsional kesehatan,
 - peserta terpapar dan paham tentang Penataan Kembali Proses Pengusulan dan Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian Utama sesuai surat dari MENSESNEG nomor B-937/M.SESNEG/D-3/AP.01.00/10/2016,
 - peserta dapat mensosialisasikan tata cara pembentukan tim penilai di tingkat UPT dan menginisiasi pembentukan tim penilai jika belum ada tim penilai di UPT-nya,
 - peserta memahami proses penyusunan dan penilaian DUPAK dan mampu menggunakan aplikasi E-PAK untuk usulan DUPAK secara *online*.
- Workshop Implementasi PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terhadap Jabatan Fungsional Dokter dan Dokter Pendidik Klinis Hasil yang dicapai dari workshop ini adalah:
 - peserta terpapar mengenai dampak Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 terhadap Jabatan Fungsional Dokter dan Dokter Pendidik Klinis,
 - penyiapan justifikasi untuk usulan Batas Usia Pensiun (BUP) Dokter Pendidik Klinis kembali menjadi 65 tahun
 - tercapainya kesepakatan terkait Timeline Pengajuan Kenaikan Jabatan Fungsional ke Jenjang Ahli Utama:
 - Pengusulan Dupak Lengkap dari pengusul dengan batas waktu 6 (enam) minggu
 - Diterima di Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan untuk cetak SK PAK dengan jangka waktu 1 bulan

- Dari Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan dikirim ke Biro Kepegawaian untuk Verifikasi usulan dan Surat Pengantar ke BKN dengan jangka waktu 1 bulan.
 - Persetujuan Teknis dari BKN dengan jangka waktu 1 bulan.
 - Penetapan SK Jabatan Ahli Utama dari Sekretariat Negara RI dengan jangka waktu 3 bulan.
- *Workshop* Kepegawaian “*Updating* data sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMKA)” Hasil yang dicapai dalam kegiatan tersebut adalah UPT Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Satuan Kerja dapat melakukan migrasi data kepegawaian yang ada di unit kerja masing-masing dan disesuaikan dengan struktur organisasi dan rumah jabatannya. Migrasi harus sesuai dengan realisasi di lapangan. Apabila pegawai akan dimigrasikan maka harus memperhatikan jabatan pegawai yang bersangkutan apakah sesuai atau tidak dengan unit kerjanya.

(2) Sidang Tim Penilai dan Validasi Administrasi Kenaikan Pangkat

Telah dilaksanakan 8 kali Sidang Tim Penilai Pusat dari bulan Maret 2017 hingga Desember 2017. Dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

JUMLAH DUPAK (Periode 3 Januari 2017 – 8 Desember 2017)

- a. Jumlah DUPAK diterima = 2058 usulan
- b. Jumlah DUPAK tidak lengkap = 85 usulan
- c. Jumlah DUPAK tidak valid = 88 usulan
- d. Jumlah DUPAK tidak lulus penilaian = 303 usulan
- e. Jumlah DUPAK selesai = 2404 *)

***) Sumber Data: aplikasi SIMPADUBUK, dengan catatan sebagian berkas selesai adalah berkas yang masuk di tahun 2016**

- Usulan Proses kenaikan pangkat sebanyak 7.099 dari 2 Periode yaitu Kenaikan Pangkat Periode April dan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2017 usulan Kenaikan Pangkat, dengan data sebagai berikut :

Tabel 9 Jumlah Proses Kenaikan Pangkat Tahun 2017

1). Kenaikan Pangkat Periode April 2017 :

No.	Periode	Jenis Kenaikan Pangkat	Usulan
1.	1 April 2017	Reguler, Pilihan	1.188
		Jabatan Fungsional	2.538
	Jumlah		3.726

2). Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2017 :

No.	Periode	Jenis Kenaikan Pangkat	Usulan
1.	1 April 2017	Reguler, Pilihan	245
		Jabatan Fungsional	3.128
	Jumlah		3.373

(2) Regionalisasi Panduan Penyusunan PAK

Kegiatan ini merupakan sosialisasi mengenai tatacara pelaksanaan pengisian DUPAK Online pada aplikasi SIMPADU, juga tata cara usulan penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional kesehatan.

(3) Pengembangan Kepegawaian

Kegiatan ini merupakan fasilitasi untuk pelaksanaan pelantikan eselon III dan IV dan fasilitasi pelaksanaan sertijab pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan kesehatan, dalam tahun 2017 rekap pelaksanaan pelantikan dan pelaksanaan sertijab disajikan dalam table sbb :

**REKAPITULASI PELAKSANAAN PELANTIKAN JA, JPT, dan JFT AHLI UTAMA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

NO	TGL /BULAN	KETERANGAN					JUMLAH
		II.a	II.b	III	IV	JFT	
1	Tanggal, 10 April 2017		9				9
2	Tanggal, 7 Juli 2017	3	4				7
3	Tanggal, 19 Juli 2017			74	162		236
4	Tanggal, 9 Agustus 2017				4		4
5	Tanggal, 26 September 2017					21	21
6	Tanggal, 31 Oktober 2017					34	34
7	Tanggal, 3 November 2017	2	3				5
	T O T A L	5	16	74	166	55	316

**REKAPITULASI DAFTAR PEJABAT YANG SERAH TERIMA JABATAN TAHUN
2017
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHA**

NO	TGL /BULAN	TEMPAT	JUMLAH
1	Tanggal, 11 Januari 2017	RS Stroke Nasional Bukittinggi/ gabungan dengan RSUP dr M Djamil Padang	4 orang
2	Tanggal, 28 April 2017	Hotel Alana Surakarta/ gabungan dengan UPT	10 orang
3	Tanggal, 13 Juli 2017	RSUP Fatmawati	13 orang
4	Tanggal, 8 November 2017	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	1 orang
5	Tanggal, 9 November 2017	RSUP dr Sardjito Yogyakarta	1 orang
6	Tanggal, 13 Nopember 2017	RS Pusat Otak Nasional	1 orang
7	Tanggal, 15 Nopember 2017	RSUP Prof dr. R D Kandou Manado	1 orang

(4) **Monitoring, Bimbingan dan Evaluasi Kepegawaian**

Kegiatan ini merupakan bagian dari monev terpadu bagian kepegawaian dan umum, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk pendampingan dalam hal penataan di bidang kepegawaian meliputi : penyelesaian kasus kepegawaian serta masalah – masalah administrasi kepegawaian lainnya. Rekap penyelesaian permasalahan kasus kepegawaian maupun bimbingan penataan administrasi kepegawaian disajikan dalam tabel sbb :

• **Proses Administrasi Mutasi PNS di Lingkungan Ditjen Yankes**

Jumlah usulan mutasi yang diterima :

Usulan mutasi yang masuk ke Ditjen Pelayanan Kesehatan sebanyak 383 berkas, dan semuanya sudah diteruskan ke Biro Kepegawaian, dari usulan tersebut sudah 25 usulan yang disetujui, dan yang sedang berproses adalah 25 usulan.

• **Validasi pemutihan ibel/tubel**

Validasi pemutihan izin belajar dan tugas belajar dilaksanakan dalam 3 tahap selama tahun 2017 dengan hasil sebagai berikut:

VALIDASI	Usulan		SK Selesai	
	<i>Ibel</i>	<i>Tubel</i>	<i>Ibel</i>	<i>Tubel</i>
Tahap 1	320	160	100	110
Tahap 2	431	150	321	155
Tahap 3	486	169	Belum Jadi	Belum Jadi
TOTAL	1237	479	421	265

(5) **Workshop Layanan Pengadaan Pertemuan Penyusunan RUP Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2018**

1. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan memiliki 54 Satuan Kerja yang terdiri dari 6 Satuan Kerja Kantor Pusat dan 49 Satuan Kerja Kantor Daerah dan seluruh satuan kerja telah menginput Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRuP) milik LKPP.

2. Rencana Umum Pengadaan yang telah diinput akan diverifikasi dan diumumkan oleh KPA masing-masing satuan kerja.
3. Terdapat 26 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang akan melaksanakan lelang Pra-DIPA.
4. Rencana Tindak Lanjut di Tahun Anggaran 2018:
 - a. Dibuatkan edaran yang mengingatkan KPA masing-masing satuan kerja agar segera mengumumkan RUP.
 - b. Menyelenggarakan Workshop Layanan Pengadaan Pertemuan Penyusunan RUP Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2019 di tahun 2018

(6) Penyusunan NSPK dan E- Catalogue

1. Keterbatasan jenis maupun ragam komoditas yang dibutuhkan di Katalog Nasional maka kementerian kesehatan harus segera mendorong agar komoditas yang dibutuhkan dicantumkan di katalog LKPP baik Katalog nasional ataupun katalog sektoral Kementerian Kesehatan.
2. Melakukan telaah teknis/ kelayakan barang oleh Direktorat teknis yang selanjutnya diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk diproses pada Katalog Nasional.
3. Kesiapan payung hukum dan aturan serta struktur organisasi Tatalaksana Kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk mencapai layanan pengadaan yang terintegrasi di satuan kerja vertikal, serta perlu adanya standar minimum ULP/ Instalasi Pengadaan sehingga memacu ULP/ Instalasi Pengadaan untuk bekerja maksimal dan memiliki integrasi yang tinggi.
4. Mempercepat penerbitan SOTK ULP/ Instalasi Pengadaan yang mengintegrasikan fungsi Layanan Pengadaan di satuan kerja vertikal.

(7) Monitoring, Bimbingan dan Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa

Mengingat pentingnya pengadaan barang/ jasa di satuan kerja baik dalam operasional satuan kerja maupun kepatuhan terhadap ketentuan hukum perlu dilakukan monitoring, bimbingan dan evaluasi secara simultan.

Adapun hasil dari monitoring, bimbingan dan evaluasi di satuan kerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk Pokja ULP, sehingga ULP masih rangkap menjalankan tupoksinya ditempat lain, tidak adanya

regenerasi organisasi PBJ, hal ini disebabkan kurangnya minat untuk menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa mengingat banyaknya paket pengadaan yang harus diselesaikan maka diperlukan adanya penambahan dan regenerasi personil di ULP.

2. Perlu adanya ruang arsip sementara, ruang tunggu dan terima tamu untuk menjamin kelancaran pengadaan barang/ jasa.
3. Di sebagian Satker Koordinasi antara PA, PPK dan ULP terjalin sangat baik dari proses perencanaan sampai proses pengadaan dan pembayaran. Namun sebagian satker lainnya masih banyak yang belum melibatkan ULP dalam hal perencanaan anggaran sehingga belum sesuai dengan kebutuhan.
4. Perlu adanya penyesuaian tunjangan jabatan/ tingkat remunerasi berdasarkan beban dan resiko pekerjaan yang diemban.
5. Masalah Pengarsipan perlu menjadi perhatian, tata kelola pengarsipan pengadaan barang dan jasa dipandang perlu, dengan banyaknya berkas dari pengadaan barang dan jasa.
6. Perlu Format untuk membuat kajian ulang tentang paket pengadaan barang dan jasa

(8) **Workshop Ketatausahaan dan rumah tangga, meliputi :**

- Workshop Sekretaris pimpinan, tujuan dari workshop ini memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para Sekretaris pimpinan di lingkungan kantor pusat dan UPT vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan. Pelatihan ini meliputi keterampilan Public Speaking, Kemampuan berbahasa Inggris dan juga kemampuan Sekretaris sebagai Event Organizer. Capaian hasil dari workshop ini terlatihnya 75 orang yang bertugas pada sekretaris pimpinan baik di kantor pusat maupun di upt vertikal.
- Workshop tata naskah dinas dan pola klasifikasi arsip tujuan dari workshop ini untuk mensosialisasikan tata naskah dinas sesuai SOTK baru serta penyusunan draft pola klasifikasi arsip sesuai dengan Permenkes 14 tahun 2017 .Output dari kegiatan ini tersusunnya Juknis pola klasifikasi arsip di lingkungan Ditjen Pelayanan kesehatan.

- Workshop Manajemen Kearsipan, tujuan dari workshop ini adalah pelatihan dalam pengelolaan arsip terutama arsip Inaktif, meliputi tahap- tahap dalam penyusutan arsip diantaranya : pemilahan arsip dan pemberkasan arsip. Pada workshop ini dilakukan praktek pemilahan arsip yang dibimbing dengan nara sumber dari ANRI dan Biro Umum, Output dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya jumlah satker yang melakukan penyusutan arsip .

(9) **Inventarisasi kearsipan,**

Kegiatan ini meliputi kegiatan penataan kearsipan di lingkungan kantor pusat Ditjen Yankes, kegiatan ini dilakukan sebanyak 5 kali dengan output yang tercapai :

- Pemilahan dan penyusutan dokumen SPJ BUKR tahun 2009.
- Pemilahan dokumen subag Pengadaan sebanyak 15 dus besar
- Penyusutan doukumen bagian Keuangan dan BMN sebanyak 14 box.
- Penyusutan dokumen bagian Kepegawaian dan Umum
- Re- filing bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- Penyusutan arsip bagian PI sebanyak 21 box dan pengentrian ke dalam daftar arsip .
- Re- filing dokumen bagian kepegawaian dan umum

(11) **Lintas program/lintas sektor Kepegawaian dan Umum,** merupakan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan unit lainnya dalam satu Kementerian maupun antar Kementerian lainnya guna peningkatan kinerja dan pengembangan informasi yang berkaitan dengan Tupoksi Bagian kepegawaian dan Umum, dalam tahun anggaran 2017 kegiatan dilaksanakan sebanyak 13 trip perjalanan.

(12) **Monitoring, Bimbingan dan evaluasi ketatausahaan dan rumah tangga.** Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari workshop-workshop yang diadakan oleh sub bagian ketatausahaan dan rumah tangga serta pembinaan di bidang ketatausahaan kepada satker vertikal di

lingkungan Ditjen Pelayanan kesehatan, pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 10 trip perjalanan. Hal – hal yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pendampingan dalam kegiatan penyusutan arsip di satker, monitoring penggunaan Tata Naskah Dinas pada satker dan juga sosialisasi penggunaan e-office pada satker vertical.

- (13) **Rapat Kerja di lingkungan Ditjen pelayanan kesehatan,**
dalam tahun anggaran 2017, Kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi tahun 2017 serta penajaman program untuk tahun 2018.
- (14) **Lintas sektor/lintas program kegiatan Ditjen Yankes,**
kegiatan ini meliputi kegiatan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri . Tujuan dari kegiatan ini sebagai ajang untuk pertukaran informasi dan update informasi maupun teknologi terbaru di bidang kesehatan serta dalam rangka koordinasi dengan unit lainnya dalam satu Kementerian maupun antar Kementerian lainnya guna peningkatan kinerja dan pengembangan informasi
- (15) **Transformasi Budaya Kerja Sekretariat Ditjen Yankes,**
kegiatan ini merupakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Sekretariat Ditjen Yankes dalam rangka perubahan budaya kerja, guna meningkatkan efseinsi dan efektifitas pelayanan terhadap publik, dalam tahun anggaran ini jumlah SDM yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 240 orang.
- (16) **Penyusunan Laporan dan Rencana Kegiatan bagian kepegawaian dan umum.**
Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas bagian kepegawaian dan Umum serta penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam RKAKL bagian kepegawaian dan umum, dalam tahun anggaran 2017 kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 8 trip perjalanan yang terdiri dari : (penyusunan LAKIP TA 2016, Penyusunan draft LAKIP TA 2017, Reviu pagu Indikatif anggaran 2018, Reviu pagu Definitif anggaran 2018)

- (17) **Pengadaan alat Pengolah Data** ,
pada tahun anggaran 2017 sudah terealisasi pengadaan alat pengolah data. Pengadaan belanja modal lainnya yang meliputi pengembangan software- software yang ada di bagian Kepegawaian dan umum serta rencana pengadaan aplikasi e-arsip serta integrasi e-PAK, SIMPADU BUK dengan SIMKA yang belum terealisasi.
- (18) **Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran,**
Pengadaan Peralatan perkantoran sudah terealisasi sebesar 59 %
- (19) **Pengadaan meubelair ruang rapat**
yang belum terealisasi karena terkendala waktu untuk pelaksanaan lelang yang tidak cukup, karena revisi DIPA baru terbit di awal Desember.
- (20) **Pengadaan Peralatan ruang record centre**
Kegiatan ini belum terealisasi karena terkendala waktu untuk pelaksanaan lelang yang tidak cukup, karena revisi DIPA baru terbit di awal Desember
- (21) **Pengadaan Renovasi kantor**
Kegiatan ini sudah terealisasi seluruhnya, ruangan yang direnovasi meliputi ruangan kerja dilingkungan kantor pusat Ditjen pelayanan kesehatan.
- (22) **Pengadaan Renovasi Rumah Dinas Jabatan,**
pada tahun 2017 yang terealisasi baru dalam tahap perencanaan sedangkan untuk tahap konstruksi belum dapat terealisasikan, karena terkendala dengan proses pengosongan lahan yang belum selesai, dan diajukan lagi penganggarannya pada tahun 2018.

(23) **Layanan Perkantoran,**

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang operasional perkantoran Ditjen Pelayanan Kesehatan, meliputi kegiatan penyediaan sarana/prasarana rapat, jamuan tamu, pengiriman surat, langganan jasa Internet, telepon, pengadaan seragam dinas, pengadaan barang untuk keperluan konsumsi, pemeliharaan perkantoran, peralatan dan mesin serta inventaris dan penyediaan tenaga pengemudi dan pramubakti, hasil dari kegiatan ini terlaksananya seluruh kegiatan penunjang , sarana/prasarana perkantoran selama tahun anggaran 2017, tersaji dalam tabel berikut

Tabel 10 , Tabel pelaksanaan pemeliharaan sarana/prasarana perkantoran Tahun Anggaran 2017

NO	Uraian Kegiatan	Hasil Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Pemeliharaan kendaraan roda 2	41	41	26
2	Pemeliharaan kendaraan roda 4	54	54	41
3	Perpanjangan STNK roda 2	41	41	26
4	Perpanjangan STNK roda 4	54	54	41
5	Pemeliharaan Alat pengolah data	313 unit	393 unit	200 unit
6	Pemeliharaan mesin foto copy	7 unit	7 unit	7 unit
7	Pemeliharaan AC split	50 unit	50 unit	50 unit
8	Pemeliharaan ruang kerja	2 keg	2 keg	2 keg
9	Pemeliharaan CCTV	1 paket	1 paket	1 paket
11	Pemakaian ruang rapat			
	- Ruang Rapat Yankes I	115 kali	82 kali	160 kali
	- Ruang Rapat Yankes II	28 kali	20 kali	41 kali
	- Ruang Rapat Yankes III	20 kali	37 kali	42 kali

3) **PERMASALAHAN**

Beberapa kegiatan yang tidak tercapai realisasinya disebabkan karena proses revisi yang terbit hampir diakhir tahun anggaran sehingga tidak cukup waktu untuk proses pengadaannya.

Sedangkan untuk kegiatan renovasi rumah dinas jabatan terkendala proses pengosongan lahan yang masih bermasalah.

4) **USUL PEMECAHAN MASALAH**

Untuk renovasi rumah dinas, proses pengosongan akan berkoordinasi dengan biro Hukor yang menangani masalah sengketa lahan, sedangkan untuk alokasi anggarrannya akan diajukan kembali pada tahun 2018.

Perencanaan harus dilakukan setepat mungkin sehingga tidak diperlukan revisi revisi anggaran di akhir tahun.

5) **REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun 2017 Bagian Kepegawaian dan Umum mendapat alokasi sebesar Rp 28.961.347.000 (diluar anggaran belanja gaji dan tunjangan) dengan realisasi sebesar Rp 22.307.018.177 (77,02 %)

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 11. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan perbagian

BAGIAN	PAGU	REALISASI	%
BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI	Rp 21.103.016.000	Rp 13.299.531.452	63,02
BAGIAN HUKORMAS	Rp 10.431.354.000	Rp 8.902.619.570	85,34
BAGIAN KEUANGAN DAN BMN	Rp 12.900.751.000	Rp 12.821.775.024	99,39
BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	Rp 8.688.657.000	Rp 8.071.101.490	92,89
2094.951 Layanan Internal (Overhead)	Rp 12.816.177.000	Rp 4.691.647.041	36,61
2094.994 Layanan Perkantoran	Rp 121.071.023.000	Rp 93.270.482.489	77,04
GRAND TOTAL	Rp 187.010.978.000	Rp 141.057.157.066	75,43

Sumber data : Monev DJA periode 25 Januari 2018

Pada tahun 2017 Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan mendapatkan alokasi akhir Rp. 216.656.596.000,- dan di lakukan pemotongan efisiensi pada pertengahan tahun sebesar Rp. 29.645.608.000,- sehingga alokasi yang bisa digunakan sebesar Rp. 187.010.978.000,- dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 141.057.157.066,- (75,43%). Persentase realisasi anggaran perbagian yang paling rendah adalah Bagian Program dan Informasi. Realisasi layanan internal (*over head*) rendah (36,61%) karena hal ini disebabkan adanya paket pengadaan sistem informasi yang tidak dilaksanakan yang berdampak pada realisasi anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Tabel 12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Komponen	Alokasi	Realisasi	%
1	51 BELANJA PEGAWAI	109.666.833.000	82.510.014.640	75,24
2	52 BELANJA BARANG	64.227.968.000	53.563.126.965	83,40
3	53 BELANJA MODAL	13.116.177.000	4.984.015.461	38,00
TOTAL		187.010.978.000	141.057.157.066	75,43

Sumber data : Monev DJA 25 Januari 2018

Persentase realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yang paling rendah adalah belanja modal. Hal ini disebabkan oleh :

- Terdapat 2 paket pengadaan yang tidak terlaksana karena waktu yang tidak mencukupi

Tabel 14. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan Yang Mendukung Langsung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2017

NO	INDIKATOR	ALOKASI	REALISASI	%
1	Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif	2.057.914.000	1.058.318.578	51,43
2	Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas	6.865.731.000	5.256.397.695	76,56
TOTAL		8.923.645.000	6.314.716.273	70,76

Sumber data : Monev DJA 25 Januari 2018

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8.923.645.000,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program dengan realisasi sebesar 70,76% (Rp.6.314.716.273,-). Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja program sebesar 4,77% dari total alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2017. Alokasi anggaran lainnya dipergunakan Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional dan tupoksinya (melaksanakan

koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan).

C. SUMBER DAYA LAINNYA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi atau institusi. SDM dalam hal ini disebut sebagai pegawai merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi atau dapat dikatakan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Keadaan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada tanggal 31 Desember 2017 berjumlah 186 pegawai, yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan berdasarkan golongannya

No	Nama Satuan Organisasi	Golongan																				
		I					II					III					IV					
		A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	E	Jml
1.	Bagian Program dan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	16	8	6	37	3	1	0	0	0	4
2.	Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	5	2	31	0	4	0	0	0	4
3.	Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	5	14	7	7	33	1	0	0	0	0	1
4.	Bagian Kepegawaian dan Umum	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	18	14	8	11	51	1	1	0	0	0	2
5.	Satuan Organisasi Kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL		0	0	0	0	0	0	1	5	16	22	38	60	28	26	152	5	6	0	1	0	12

Sumber data : SIMKA tanggal 26 Januari 2018

Berdasar tabel di atas maka golongan pegawai di Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan yang terbanyak adalah golongan III, diikuti golongan II dan golongan IV.

Tabel 15. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan berdasarkan Tingkat Pendidikannya

No	Nama Satuan Organisasi	Pendidikan													Jumlah	
		S3	S2	Spesialis 1/2/A V	A IV	S1	D IV	D III	Akademi	SM	D II	D I	SMA	SMP		SD
1.	Bagian Program dan Informasi	0	10	0	0	21	0	5	0	0	0	0	8	0	0	44
2.	Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	0	8	0	0	21	0	0	1	0	0	0	5	0	0	35
3.	Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	0	3	0	0	27	0	9	1	0	0	0	3	0	0	43
4.	Bagian Kepegawaian dan Umum	0	5	0	0	33	0	14	0	0	0	0	11	0	0	63
5.	Satuan Organisasi Kosong	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		1	26	0	0	102	0	28	2	0	0	0	27	0	0	186

Sumber data : SIMKA tanggal 26 Januari 2018

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan terbanyak adalah sarjana (S1), sedangkan pegawai Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan yang berpendidikan SD dan SMP sudah tidak ada, hal ini menunjukkan kekuatan sumber daya manusia Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan sudah semakin membaik dari segi pendidikan.

2. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :

a. BMN Intrakomtable

Posisi Awal (1 Januari 2017)	: Rp. 839.241.026.182,-
Penambahan	: Rp. 251.170.335.311,-
Pengurangan	: Rp. 2.105.050.000,-
Posisi Akhir (31 Desember 2017)	: Rp. 1.088.306.331.493 ,-

BMN Ekstrakomtable

Posisi Awal (1 Januari 2017)	: Rp.	1.354.637.950,-
Penambahan	: Rp.	0,-
Pengurangan	: Rp.	0,-
Posisi Akhir (31 Desember 2017)	: Rp.	1.354.637.950,-

b. BMN Gabungan Intra Dan Ekstra

Posisi Awal (1 Januari 2017)	: Rp.	840.595.664.132,-
Penambahan	: Rp.	251.170.355.311,-
Pengurangan	: Rp.	2.105.050.000,-
Posisi Akhir (31 Desember 2017)	: Rp.	1.089.660.969.443,-

c. BMN Aset Tak Berwujud

Posisi Awal (1 Januari 2017)	: Rp.	16.516.592.030,-
Penambahan	: Rp.	586.873.420,-
Pengurangan	: Rp.	0,-
Posisi Akhir (31 Desember 2017)	: Rp.	17.103.465.450,-

Berdasarkan hasil laporan posisi barang milik negara Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Neraca sampai dengan 31 Desember 2017 tercatat bruto sebesar Rp. 1.106.238.289.428,- dan Netto sebesar Rp. 294.626.687.658,- dengan angka penyusutan sebesar Rp. 811.611.601.770,- (Sumber : SIMAKBMN UAPPBE1 Sekretariat Ditjen Yankes per 31 Desember 2017).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes), serta tahun pertama perubahan dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan menjadi Ditjen Pelayanan Kesehatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tahun 2017 **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Pencapaian pada tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target salah satunya adalah adanya efisiensi anggaran, namun demikian hal tersebut dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Mengingat target akhir pembangunan jangka menengah masih cukup besar, maka, maka pada tahun 2018 Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan harus melakukan terobosan inovatif yang berguna untuk mengejar ketertinggalan dan mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan

perencanaan yang baik dan pengimplementasian kegiatan yang konsisten dengan perencanaan tersebut

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS
NIP 196108201988121001

Jakarta, 6 Januari 2017

Pihak Pertama,

Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes
NIP 196008121988121001

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Tahun : 2017

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya mutu dan kualitas fasilitas pelayanan primer, rujukan dan penunjang	1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas	60 100

Jumlah anggaran tahun 2017: Rp. 216.656.596.000,-

(Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)



Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

dr. Bambang Wibowo, Sp. OG(K), MARS
NIP 196108201988121001

Jakarta, 6 Januari 2017

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ,

Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp. OT(K), M.Epid, MH.Kes
NIP 196008121988121001